



RENSTRA



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

Jl. Dr. Soeparno Nomor 28 Purwokerto Kode Pos 53111
Telp (0281) 636094 Email kecamatanpwttimur@gmail.com
Website purwokertotimurkec.banyumaskab.go.id

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.3.1 Maksud	5
	1.3.2 Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
	2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
	2.1.2 Uraian Tugas	10
	2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	33
	2.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	46
	2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan.....	50
	2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan ...	51
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	51
	2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	52
	2.2.2 Isu Strategis.....	53
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
	3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	56
	3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah	56
	3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	59
	3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	59
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	61
	4.1 Uraian Program.....	61
	4.2 Uraian Kegiatan	62
	4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan pagu Indikatif.....	63
	4.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	101
	4.4.1 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah	102
	4.4.2 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Daerah.....	104
BAB V	PENUTUP.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

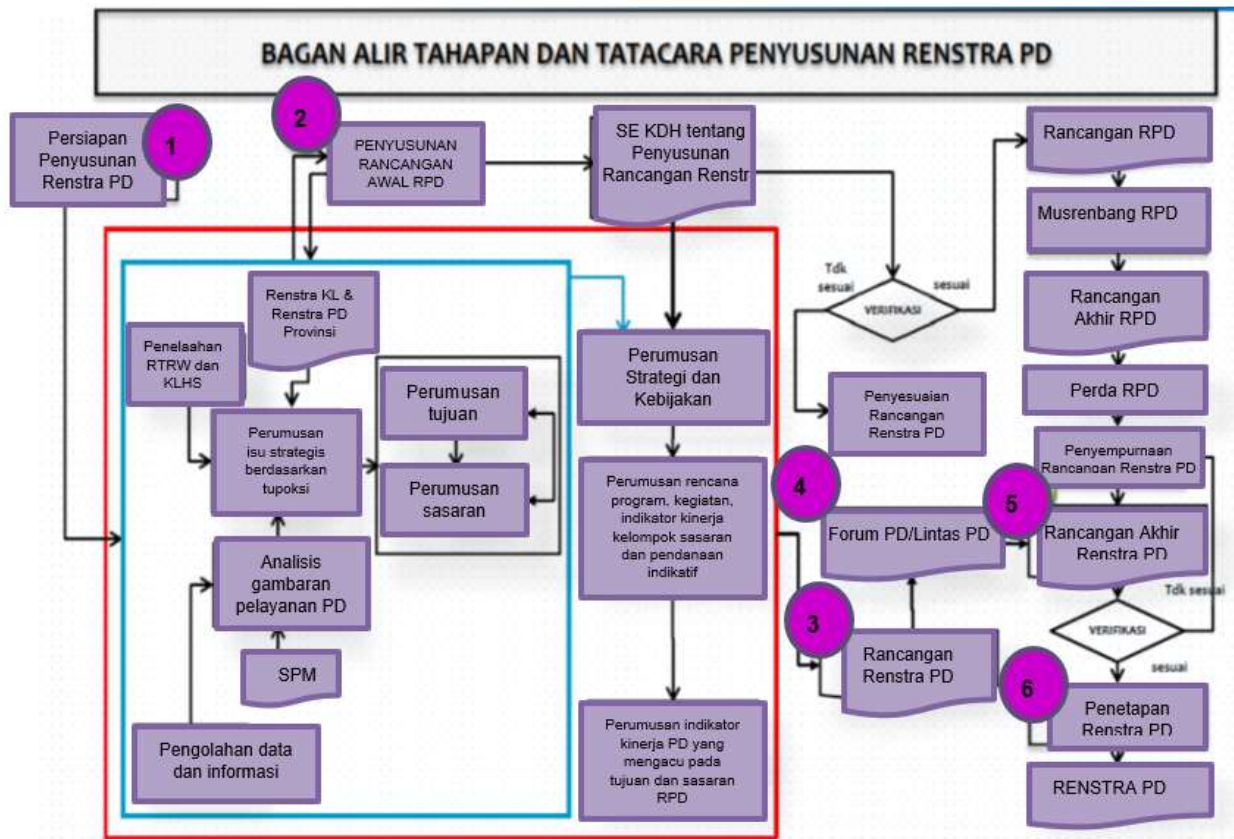
Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Dampak pelaksanaan pilkada serentak secara nasional akan terjadi kekosongan jabatan disekelompok daerah karena adanya masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom baru. Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk menyusun Dokumen perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah

untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan Purwokerto Timur merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu lima tahun (2025-2029) sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purwokerto Timur dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Kecamatan Purwokerto Timur telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD seperti yang tertuang pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2006-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Banyumas

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran daerah dalam bentuk program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan yang terkait urusan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Purwokerto Timur;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Purwokerto Timur;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purwokerto Timur yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan rencana strategis Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, uraian tugas, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Purwokerto Timur, serta isu strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatif Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok Kecamatan adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas maka Kecamatan dengan didukung program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas Kedudukan Kecamatan dan kelurahan adalah koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban Kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban Kelurahan;

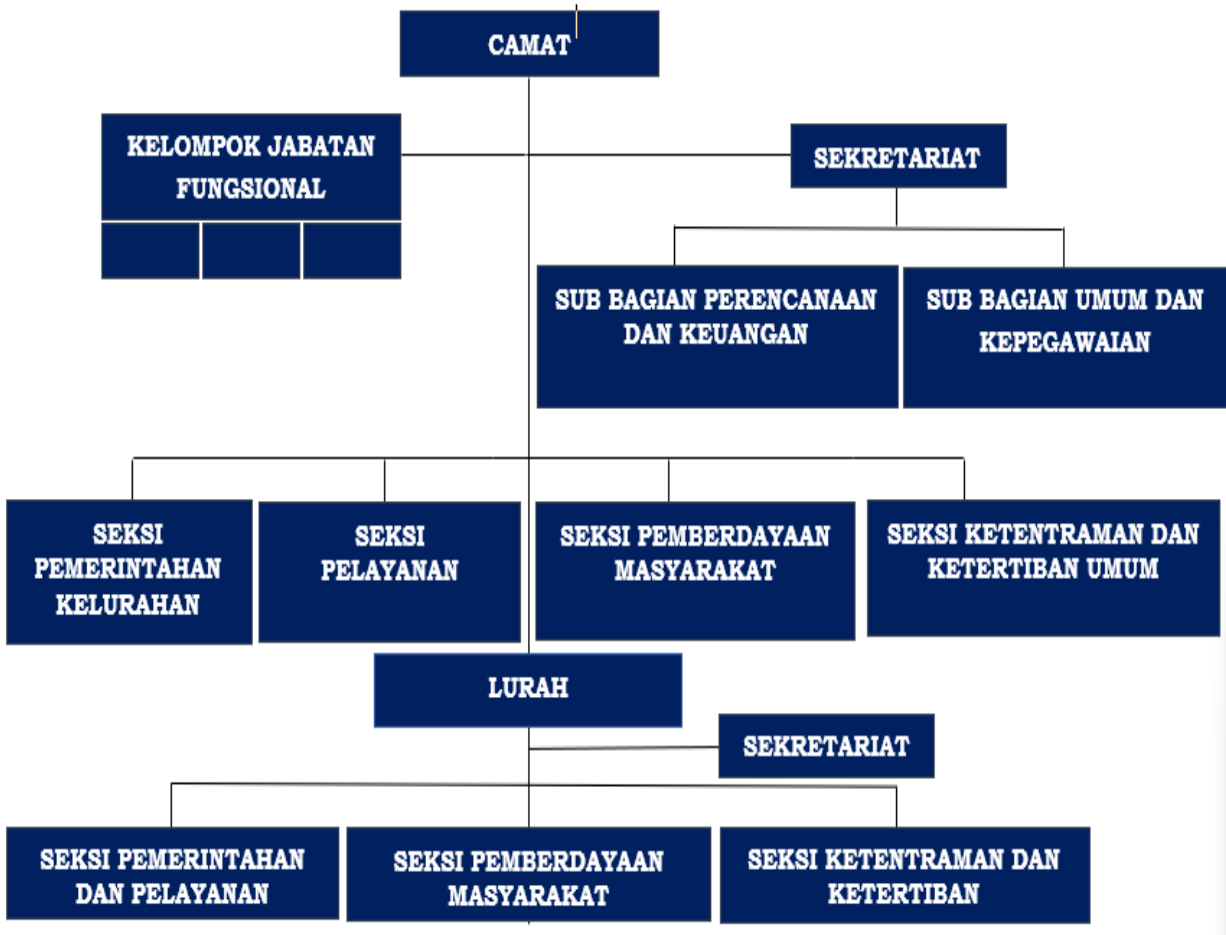
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta Kelurahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat ketentraman dan ketertiban Kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan Purwokerto Timur terdiri atas :

- 1) Camat
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Seksi Pemerintahan Kelurahan
- 4) Seksi Pelayanan
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 7) Kelompok jabatan fungsional
- 8) Kelurahan

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Purwokerto Timur
Kabupaten Banyumas



Sumber: Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas

2.1.2. Uraian Tugas

Uraian tugas dalam struktur organisasi sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, sebagai berikut :

a. Camat :

Camat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Uraian Tugas Camat Purwokerto Timur sebagai berikut :

- 1) Merumuskan Rencana Strategis Kecamatan berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang/ Jangka Menengah sebagai pedoman tugas ;
- 2) Mengoordinasikan penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan di tingkat kecamatan sesuai dengan sasaran strategis untuk pengendalian pelaksanaan tugas ;
- 3) Mengendalikan seluruh pelaksanaan program di tingkat kecamatan dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana
- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat kecamatan sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis kecamatan agar sasaran strategis dapat tercapai ;
- 5) Membina Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat kecamatan dengan memfasilitasi pengembangan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas ;
- 6) Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan dan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan

untuk melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin terwujudnya pelaksanaan tugas dan atau memberika pertimbangan kepada pimpinan ;

- 7) Mengarahkan dan membimbing pelaksanaan program kerja kesekretariatan, dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau Kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

b. Sekretaris Kecamatan :

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di tingkat Kecamatan. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program kerja Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien ;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan ;
- 5) Merumuskan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
- 6) Mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat ;
- 7) Melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program kerja Sekretariat;

- 8) Memvalidasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat ;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang ;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan:

Kepala Sub bag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan tentang perencanaan dan keuangan di lingkungan kecamatan.

Dengan Uraian Tugas:

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- 2) Membagi tugas pada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas ;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar ;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan ;
- 5) Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 6) Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- 7) Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 8) Memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja yang akan datang;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya

d. Kepala Sub bag Umum dan Kepegawaian Kecamatan:

Kepala Sub bag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas Menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada Kecamatan, dengan uraian Tugas :

- 1) Merencanakan Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar ;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- 5) Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 6) Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- 7) Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 8) Memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

e. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan pada Kecamatan:

Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kegiatan Pemerintah;

Uraian Tugas:

- 1) Merencanakan Kegiatan Seksi Pemerintahan Kelurahan berdasarkan rencana opsional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan Kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan Kelurahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan Kelurahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan Kegiatan Seksi Pemerintahan Kelurahan;
- 6) Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Kelurahan;
- 7) Melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai.
- 8) Melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai.
- 9) Memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi.
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Kelurahan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pemerintahan Kelurahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

f. Kepala Seksi Pelayanan pada Kecamatan :

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kegiatan Pelayanan.

Uraian Tugas:

- 1) Merencanakan Kegiatan Seksi Pelayanan berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan Kegiatan Seksi Pelayanan yang meliputi penyusunan rumusan teknis;
- 6) mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan;
- 7) Melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai.
- 8) Melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai.
- 9) Memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi.
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang ;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya ;

g. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat :

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan uraian Tugas:

- 1) Merencanakan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 6) Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 7) Melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai.
- 8) Melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai.
- 9) Memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi.
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat serta tugas di lingkungannya dengan cara

- membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
 - 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

h. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan uraian tugas:

- 1) Merencanakan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 6) Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 7) Melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai

- dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
- 8) Melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
 - 9) Memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
 - 10) Mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
 - 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Kelurahan

Susunan organisasi kelurahan terdiri atas :

- 1) Lurah
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan
- 3) Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- 4) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kedudukan, Tugas Kelurahan adalah :

- 1) Kedudukan Kelurahan :

Kelurahan merupakan pembantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah

- 2) Tugas Kelurahan :

Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum di lingkungan kelurahan.

Ringkasan dan Uraian Tugas yang melekat pada masing – masing Jabatan di Kelurahan sesuai dengan susunan organisasi adalah :

a. Lurah

Ringkasan Tugas Lurah : Memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pelaksanaan kebijakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di tingkat kelurahan. Uraian tugas Lurah sebagai berikut :

- 1) Menyusun kebijakan program kerja dan kegiatan meliputi seksi pemerintahan dan pelayanan, seksi pemberdayaan masyarakat dan seksi ketentraman ketertiban sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas ;
- 2) Menyusun rencana operasional di lingkungan kelurahan berdasarkan program kerja kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 3) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 4) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan kelurahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 5) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan kelurahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- 6) Menyusun kebijakan program kerja dan kegiatan meliputi seksi pemerintahan dan pelayanan, seksi pemberdayaan masyarakat dan seksi ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- 7) Melaksanakan koordinasi kebijakan kesekretariatan, seksi pemerintahan dan pelayanan, seksi pemberdayaan masyarakat dan seksi ketentraman dan ketertiban di tingkat kelurahan untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 8) Mengendalikan penyelenggaraan kebijakan dan kegiatan kesekretariatan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pelaksanaan kebijakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di tingkat kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kelancaran tugas;
- 9) Melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan dan kegiatan kesekretariatan, seksi pemerintahan dan pelayanan, seksi pemberdayaan masyarakat dan seksi ketentraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kualitas pelaksanaan tugas;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan kelurahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan kelurahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

b. Sekretaris Kelurahan

Ringkasan Tugas Sekretaris Kelurahan : Memimpin dan melaksanakan tugas menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan pada Kelurahan. Uraian tugas Sekretaris Kelurahan sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan sekretariat kelurahan berdasarkan rencana operasional kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat kelurahan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan kesekretariatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sekretariat kelurahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyusun rumusan kebijakan teknis kesekretariatan meliputi :
 - a) penyusunan perjanjian kinerja Unit Kerja;
 - b) pengusulan kebutuhan anggaran operasional kelurahan ke kecamatan;
 - c) fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - d) pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - e) pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f) pengelolaan organisasi dan tatalaksana
 - g) pengelolaan administrasi persuratan;
 - h) pengelolaan kehumasan dan keprotokolan
 - i) pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; dan lain-lainsesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan

- 6) Mengendalikan dan/atau melaksanakan penyelenggaraan kegiatan sekretariat kelurahan kesekretariatan meliputi :
 - a) penyusunan perjanjian kinerja Unit Kerja;
 - b) pengusulan kebutuhan anggaran operasional kelurahan ke kecamatan;
 - c) fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - d) pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - e) pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f) pengelolaan organisasi dan tatalaksana
 - g) pengelolaan administrasi persuratan;
 - h) pengelolaan kehumasan dan keprotokolan
 - i) pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; dan lain-lainsesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan
- 7) Monitoring pelaksanaan kegiatan pada sekretariat kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- 8) Memverifikasi dan/ atau melaksanakan pengadministrasian kegiatan pada sekretariat kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sekretariat kelurahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sekretariat kelurahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Kelurahan

Ringkasan Tugas Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Kelurahan : Memimpin dan melaksanakan tugas

penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang pemerintahan dan pelayanan di tingkat internal kelurahan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat kepada Lurah sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan dan pelayanan.

Uraian tugas Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Kelurahan sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan berdasarkan rencana operasional kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas seksi pemerintahan dan pelayanan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi pemerintahan dan Pelayanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi pemerintahan dan pelayanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyusun rumusan kebijakan teknis kegiatan seksi pemerintahan dan Pelayanan meliputi kegiatan bidang pemerintahan dan pelayanan di tingkat internal kelurahan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat kepada Lurah sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan dan pelayanan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a) melaksanakan pengawasan atas tanah-tanah aset pemerintah kabupaten di wilayah kelurahan;
 - b) pelaksanaan administrasi kependudukan;
 - c) pelaksanaan administrasi pertanahan;
 - d) pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kelurahan;

- e) pengesahan produk-produk administrasi kelurahan;
 - f) pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat;
 - g) pelaksanaan pemberdayaan organisasi dan masyarakat;
 - h) penyusunan rupa bumi kelurahan;
 - i) penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan kriteria yang telah dilimpahkan melalui pelayanan terpadu;
 - j) pengembangan inovasi publik terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - k) pengawasan objek perizinan yang berskala kecil;
 - l) penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, meliputi: pelayanan langsung kepada masyarakat secara rutin berupa administrasi kependudukan, dan lain-lain;
 - m) memberikan informasi dan fasilitasi prosedur pelayanan perizinan kepada masyarakat; dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan
- 6) Mengendalikan dan/atau melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan meliputi kegiatan bidang pemerintahan dan pelayanan di tingkat internal kelurahan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat kepada Lurah sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan dan pelayanan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
- a) melaksanakan pengawasan atas tanah-tanah aset pemerintah kabupaten di wilayah kelurahan;
 - b) pelaksanaan administrasi kependudukan;
 - c) pelaksanaan administrasi pertanahan;
 - d) pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kelurahan;

- e) pengesahan produk-produk administrasi kelurahan;
 - f) pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat;
 - g) pelaksanaan pemberdayaan organisasi dan masyarakat;
 - h) penyusunan rupa bumi kelurahan;
 - i) penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan kriteria yang telah dilimpahkan melalui pelayanan terpadu;
 - j) pengembangan inovasi publik terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - k) pengawasan objek perizinan yang berskala kecil;
 - l) penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, meliputi: pelayanan langsung kepada masyarakat secara rutin berupa administrasi kependudukan;
 - m) memberikan informasi dan fasilitasi prosedur pelayanan perizinan kepada masyarakat; dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan
- 7) Monitoring pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
 - 8) Memverifikasi dan/ atau melaksanakan pengadministrasian kegiatan pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
 - 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;

- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Ringkasan Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan : Memimpin dan melaksanakan tugas menyusun rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat di lingkungan kelurahan. Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana operasional kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyusun rumusan kebijakan teknis kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a) melaksanakan pengembangan kegiatan bidang perekonomian;
 - b) pembinaan kesejahteraan rakyat di tingkat kelurahan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan;

- c) pelaksanaan pelestarian warisan budaya dan nilai budaya lokal;
 - d) pelaksanaan usaha sosial dan kesejahteraan rakyat yang meliputi pengumpulan data-data terkait dengan urusan pemerintah bidang pendidikan; kesehatan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; komunikasi dan informatika; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; serta kearsipan;
 - e) pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan di tingkat kelurahan;
 - f) pendataan bidang ekonomi pembangunan yang meliputi pengumpulan data-data terkait dengan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; sosial; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; perhubungan; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perindustrian dan transmigrasi;
 - g) pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan; dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan
- 6) Mengendalikan dan/atau melaksanakan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sebagai berikut :
- a) melaksanakan pengembangan kegiatan bidang perekonomian;
 - b) pembinaan kesejahteraan rakyat di tingkat kelurahan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

- sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan;
- c) pelaksanaan pelestarian warisan budaya dan nilai budaya lokal;
 - d) pelaksanaan usaha sosial dan kesejahteraan rakyat yang meliputi pengumpulan data-data terkait dengan urusan pemerintah bidang pendidikan; kesehatan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; komunikasi dan informatika; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; serta kearsipan;
 - e) pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan di tingkat kelurahan;
 - f) pendataan bidang ekonomi pembangunan yang meliputi pengumpulan data-data terkait dengan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; sosial; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; perhubungan; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perindustrian dan transmigrasi;
 - g) pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan; dan lain-lain. sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan
- 7) Monitoring pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan

yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

- 8) Memverifikasi dan/ atau melaksanakan pengadministrasian kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan

Ringkasan Tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan : Memimpin dan melaksanakan tugas menyusun rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di lingkungan kelurahan Uraian tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan rencana operasional kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- 5) Menyusun rumusan kebijakan teknis kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi kegiatan :
 - a) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - b) pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - c) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - d) inventarisasi organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan dan organisasi terlarang, dan lain-lain;
 - e) fasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f) fasilitasi pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati melalui :
 - g) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan;
 - h) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/wali kota;
 - i) fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan mobilisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - j) pendampingan penanganan bencana;
 - k) fasilitasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran; dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan

- 6) Mengendalikan dan/atau melaksanakan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi kegiatan :
- a) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - b) pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - c) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - d) inventarisasi organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan dan organisasi terlarang, dan lain-lain;
 - e) fasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f) fasilitasi pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati melalui :
 - g) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan;
 - h) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
 - i) fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan mobilisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - j) pendampingan penanganan bencana;
 - k) fasilitasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran; dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan

- 7) Monitoring pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- 8) Memverifikasi dan/ atau melaksanakan pengadministrasian kegiatan pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2.1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai di lingkungan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas pada awal tahun 2025 sebanyak 81 orang, terdiri dari 39 PNS, 0 PPPK 42 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak S1 sejumlah 24 orang. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jumlah
		PNS	PPPK	Non PNS	
1	SD	-	-	2	2
2	SMP Sederajat	1	-	3	4
3	SMA Sederajat	6	-	28	34
4	D1	-	-	-	-
5	D3	6	-	2	8
6	S1	24	-	7	31
7	S2	2	-	-	2
8	S3	-	-	-	-
	Jumlah	39	-	42	81

Sumber: SubBagian Umum dan Kepegawaian Kec. Purwokerto Timur Tahun 2025

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 32 orang pada tahun 2025, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Purwokerto Timur
Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Golongan Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	1
2	Golongan II	4
3	Golongan III	32
4	Golongan IV	2
	Jumlah	39

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Purwokerto Timur Tahun 2025

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Purwokerto Timur
Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah
1	Laki-Laki	48
2	Perempuan	33
	Jumlah	81

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Purwokerto Timur Tahun 2025

Perlengkapan/Aset yang dimiliki Kecamatan Purwokerto Timur dengan keadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan administrasi maupun operasional yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
SUMBER DAYA ASET PADA KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025

No.	Nomor		Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Nomor					Asal usul / Cara Perolehan	Harga Rp
	Kode Barang	Register						Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	132010304002	1	Portable Generating Set	2013	Tanpa Merek		BESI						APBD Kab.	5.489.000
2	132020101003	1	Station Wagon	2010	Toyota / Avanza 1.3E/F601RM-G	1298 CC	Besi / Bensin		MHFM1BA2JAK027711	DF78220	R 1039 XA	H-01157834	APBD Kab.	131.497.000
3	132020101003	1	Station Wagon	2024	Toyota / Rush 1.5 S M/T GR Spo	1500	Besi dan Plastik		MHKE8FA3JRK110444	2NR-4C08265	R 1560 XA	U-02734258	APBD Kab.	293.095.000
4	132020104001	1	Sepeda Motor	2012	Honda / NF11B2D1 M/T	110	Besi		MH1JBE215CK231092	JBE2E-1228704	R 6823 XH	J-04628250	APBD Kab.	11.685.655
5	132020104001	1	Sepeda Motor	2015	Yamaha / UE11 (Jupiter Z Fi)	113 cc	Besi		MH3UE1110FJ002353	E3R5E-0025260	R 6143 XA	M-00653966	APBD Kab.	14.762.500
6	132020104001	1	Sepeda Motor	2016	Yamaha / Jupiter Z FI Spoke	113 cc	Besi		MH3UE1110GJ004489	E3R5E-0103491	R 6734 XA	M-13544372	APBD Kab.	15.672.115
7	132020104001	2	Sepeda Motor	2016	Yamaha / Jupiter Z FI Spoke	113 cc	Besi		MH3UE1110GJ004479	E3R5E-0103483	R 6733 XA	M-13544358	APBD Kab.	15.672.115
8	132020104001	3	Sepeda Motor	2016	Yamaha / Jupiter Z FI Spoke	113 cc	Besi		MH3UE1110GJ004794	E3R5E-0109703	R 6864 XA	N-00299941	APBD Kab.	15.673.256
9	132020104001	1	Sepeda Motor	2017	Yamaha / Jupiter Z1 SPOKE	113 cc	Besi		MH3UE1110HJ005228	E3R5E-0135762	R 6254 XH	N-08058856	APBD Kab.	16.013.627
10	132020104001	2	Sepeda Motor	2022	Yamaha Mio / M3 125		Fiberglass		MH3SE88H0NJ430335	E3R2E3282847	R 6811 XH	T-01200078	APBD Kab.	17.825.000
11	132020201002	1	Gerobak Dorong	2013	Tanpa Merek		BESI						APBD Kab.	2.250.000
12	132040104005	1	Lemari Penyimpan	2013	Tanpa Merek		Kayu						APBD Kab.	3.000.000
13	132040104005	2	Lemari Penyimpan	2013	Tanpa merek		Kayu						APBD Kab.	2.300.000
14	132040104005	3	Lemari Penyimpan	2013	Tanpa merek		Kayu						APBD Kab.	2.300.000
15	132050104001	1	Lemari Besi/Metal	2007	Brother		Alumunium						APBD Kab.	1.500.000
16	132050104001	2	Lemari Besi/Metal	2007	Bradher / Brother		Besi						APBD Kab.	1.500.000
17	132050104001	3-6	Lemari Besi/Metal	2007	Bradher / Brother		Besi						APBD Kab.	6.000.000
18	132050104001	1-2	Lemari Arsip	2019	Brother / B-304	183 x 91,5 x 46 cm	Besi/ Metal						APBD Kab.	5.800.000
19	132050104002	1	Lemari Kayu	1991	Tanpa merk / lemari kayu sorok		Kayu						APBD Kab.	10.000
20	132050104002	1	Lemari Kayu	1997	Tanpa Merk / lemari kayu (Rak		Kayu						APBD Kab.	10.000

No.	Nomor		Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Nomor					Asal usul / Cara Perolehan	Harga Rp
	Kode Barang	Register						Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	132050104002	2	Lemari Kayu	1997	Tanpa Merk / Lemari kayu (Rak		Kayu						APBD Kab.	10.000
22	132050104002	1	Lemari Kayu	1998	Tanpa Merk / Lemari kayu tingg		Kayu						APBD Kab.	10.000
23	132050104002	2	Lemari Kayu	1998	Tanpa Merk / Lemari Kayu pende		Kayu						APBD Kab.	10.000
24	132050104002	1	Lemari Kayu	2008	Tanpa Merk / Lemari kayu pende		Kayu						APBD Kab.	14.000.000
25	132050104002	1	Lemari Kayu	2015	Tanpa Merk / bufet pendek		Kayu jati						APBD Kab.	3.700.000
26	132050104002	2	Lemari Pakaian	2015	tanpa merk / 3 pintu		Kayu jati						APBD Kab.	5.400.000
27	132050104003	1	Rak Besi/Metal	2015	tanpa merk / 4 tingkat	100 x 40 x 200 cm	besi						APBD Kab.	1.700.000
28	132050104007	1	Brand Kas	2019	Krisbow / Fire Safe Box 100914	53 x 48 x 61 cm	Besi/ Metal, Baja						APBD Kab.	12.900.000
29	132050104026	1	Filling Besi/Metal	2013	tanpa merk								APBD Kab.	2.000.000
30	132050104026	2-3	Filling Besi/Metal	2013	tanpa merk		besi						APBD Kab.	4.900.000
31	132050104026	1-2	Filling Besi/Metal	2015	Dolphin	4 laci	Besi						APBD Kab.	6.000.000
32	132050104026	1	Filling Besi/Metal	2017	Brother / 3 laci		Besi						APBD Kab.	2.200.000
33	132050104026	1-2	Filling Besi/Metal	2018	tanpa merk		Besi						APBD Kab.	6.000.000
34	132050104026	3	Lemari Arsip Pintu Sorong	2018	Fronline		Besi						APBD Kab.	2.900.000
35	132050104026	4	Lemari Arsip Pintu Sorong	2018	frontline		Besi						APBD Kab.	2.900.000
36	132050104026	1-2	Filling Cabinet	2019	Brother / B-104 (4 Laci)	133,5 x 45,5 x 62 cm	Besi						APBD Kab.	5.700.000
37	132050104026	1	Filling Besi/Metal Cabinet	2020	Krisbow / 4 Laci	150 x 50 x 60	Besi/ Metal						APBD Kab.	2.850.000
38	132050104026	2	Filling Besi/Metal Cabinet	2020	Krisbow / 4 Laci	150 x 50 x 60	Besi/ Metal						APBD Kab.	2.850.000
39	132050104027	1	Lemari Kaca	1977	Tanpa Merk		Kayu, Kaca						APBD Kab.	10.000
40	132050104027	1	Lemari Kaca/ Etalase	2014	tanpa merk		Alumunium&kaca						APBD Kab.	3.650.000

No.	Nomor		Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Nomor					Asal usul / Cara Perolehan	Harga Rp
	Kode Barang	Register						Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	132050104027	1	Lemari Kaca	2015	Tanpa Merk	230x50x150 cm	Kaca/alumunium						APBD Kab.	4.850.000
42	132050104027	2	Lemari Kaca	2015	Tanpa Merk	230x50x150 cm	Kaca/alumunium						APBD Kab.	4.850.000
43	132050104028	1	Lemari Makan	2015	tanpa merk	150x60x120 cm	Stainlist						APBD Kab.	2.175.000
44	132050105003	1	Running Teks	2018	Tanpa Merk		Mika						APBD Kab.	9.800.000
45	132050105005	1	White Board	2001	tanpa merk		Kayu						APBD Kab.	3.000
46	132050105005	1-2	White Board	2008	tanpa merk		kayu						APBD Kab.	4.550.000
47	132050105005	1	White Board	2015	tanpa merk / dengan standard	120 x 240 cm	Besi/Hardboard						APBD Kab.	2.250.000
48	132050105012	1	Mesin Absensi	2014	Primatch / VF300		Plastik						APBD Kab.	4.950.000
49	132050105076	1	Papan Nama Instansi	2016	Tanpa Merk		Besi dan acrylic						APBD Kab.	9.750.000
50	132050105076	1	Papan Nama Instansi	2019	Tanpa Merk	75 x 100 cm	Kayu, Stainlesssteel						APBD Kab.	1.475.000
51	132050105076	1	Papan Nama Struktur Organisasi	2022	tanpa merk		Akrilik						APBD Kab.	5.000.000
52	132050105077	1	Papan Pengumuman	2019	Tanpa Merk	100 x 180 cm	Alumunium, Kaca						APBD Kab.	3.200.000
53	132050105088	1	Mesin Antrian	2019	Tanpa merek		Multiplex						APBD Kab.	14.000.000
54	132050201002	1	Meja Kayu / Rotan	2010	Tanpa Merk		Kayu						APBD Kab.	7.170.000
55	132050201002	1	Meja Makan	2015	Tanpa Merk		Kayu jati						APBD Kab.	4.450.000
56	132050201003	1-2	Kursi Besi/Metal	2021	Tanpa Merk / Isi 4		Besi, Busa						APBD Kab.	6.600.000
57	132050201003	3	Kursi Besi/Metal	2021	Tanpa Merk / Isi 4		Besi, Busa						APBD Kab.	3.300.000
58	132050201008	1	Meja Rapat	2006	Tanpa Merek / kayu panjang		Kayu						APBD Kab.	3.125.000
59	132050201008	2	Meja Rapat	2006	Tanpa merek / kayu panjang		Kayu						APBD Kab.	3.125.000
60	132050201008	3	Meja Rapat	2006	tanpa merek / kayu panjang		Kayu						APBD Kab.	3.125.000
61	132050201008	4-8	Meja Rapat	2006	tanpa merk / kayu panjang		Kayu						APBD Kab.	9.375.000
62	132050201008	5	Meja Rapat	2006	Tanpa Merk / kayu panjang		Kayu						APBD Kab.	3.125.000

No.	Nomor		Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Nomor					Asal usul / Cara Perolehan	Harga Rp
	Kode Barang	Register						Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	132050201008	6	Meja Rapat	2006	Tanpa merk / kayu panjang		Kayu						APBD Kab.	3.125.000
64	132050201008	1-5	Meja Rapat	2015	Tanpa Merk / kayu panjang		Kayu jati						APBD Kab.	12.000.000
65	132050201008	2	Meja Rapat	2015	Tanpa Merk / kayu panjang		Kayu jati						APBD Kab.	3.000.000
66	132050201008	6-7	Meja Rapat	2015	Tanpa merk / kayu panjang		Kayu jati						APBD Kab.	6.000.000
67	132050201010	1	Tempat Tidur Kayu	2015	Tanpa Merk	160 x 200 cm	Kayu jati						APBD Kab.	2.825.000
68	132050201017	1	Meja Panjang	1983	Tanpa Merk		Kayu						APBD Kab.	10.000
69	132050201017	1	Meja Panjang	2011	Tanpa Merk	6 M	Kayu						APBD Kab.	7.183.964
70	132050201024	1	Meja 1/2 Biro	1983	Tanpa Merk		Kayu						APBD Kab.	13.800
71	132050201024	2-3	Meja 1/2 Biro	1983	Tanpa Merk		Kayu						APBD Kab.	27.600
72	132050201024	4-22	Meja 1/2 Biro	1983	tanpa merk		kayu						APBD Kab.	220.800
73	132050201024	9	Meja 1/2 Biro	1983	tanpa merk		kayu						APBD Kab.	13.800
74	132050201024	10	Meja 1/2 Biro	1983	tanpa merk		kayu						APBD Kab.	13.800
75	132050201024	12	Meja 1/2 Biro	1983	tanpa erk		kayu						APBD Kab.	13.800
76	132050201024	1	Meja 1/2 Biro	2001	Tanpa Merk		Kayu						APBD Kab.	50.000
77	132050201024	2-4	Meja 1/2 Biro	2001	tanpa merk		Kayu						APBD Kab.	150.000
78	132050201024	1-2	Meja 1/2 Biro	2018	tanpa merk	150 x 75 x 75 cm	Kayu Jati						APBD Kab.	6.750.000
79	132050201024	3-6	Meja 1/2 Biro	2018	Tanpa Merk	150 x 75 x 75 cm	Kayu Jati						APBD Kab.	13.500.000
80	132050201025	1	Kasur	2015	CORONA / Matras Basic	160 x 200 cm	Busa						APBD Kab.	3.725.000
81	132050201030	1-5	Kursi Rapat	2015	Brother		Besi/kain						APBD Kab.	2.750.000
82	132050201031	1	Kursi Tamu	1987	tanpa merk		Kayu, Busa						APBD Kab.	50.000
83	132050201031	1	Kursi Tamu	2015	tanpa merk		Kayu jati						APBD Kab.	4.800.000
84	132050201031	1	Kursi Tamu	2022	Tanpa Merek		Kayu						APBD Kab.	11.655.000
85	132050201032	1	Kursi Putar	2015	BROTHER / Putar warna merah		Busa/Besi						APBD Kab.	850.000

No.	Nomor		Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Nomor					Asal usul / Cara Perolehan	Harga Rp
	Kode Barang	Register						Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	132050201032	2	Kursi Putar	2015	BROTHER / Putar warna Merah		Busa/Besi						APBD Kab.	850.000
87	132050201032	3	Kursi Putar	2015	BROTHER / Putar Warna Merah		Busa/Besi						APBD Kab.	850.000
88	132050201032	1	Kursi Putar Sandaran Tangan	2018	Tanpa merek / Kursi putar warn		Besi, Busa						APBD Kab.	2.400.000
89	132050201032	2	Kursi Putar Sandaran Tangan	2018	Tanpa merek / Kursi Putar warn		Besi, Busa						APBD Kab.	2.400.000
90	132050201032	3	Kursi Putar Sandaran Tangan	2018	Tanpa Merek / Kursi putar warn		Besi, Busa						APBD Kab.	2.400.000
91	132050201032	4	Kursi Putar Sandaran Tangan	2018	Tanpa Merk / kursi Putar warna		Besi, Busa						APBD Kab.	2.400.000
92	132050201032	5	Kursi Putar Sandaran Tangan	2018	Tanpa Merk / Kursi Putar Warna		Besi, Busa						APBD Kab.	2.400.000
93	132050201032	6	Kursi Putar Sandaran Tangan	2018	Tanpa merk / Kursi putar warna		Besi, Busa						APBD Kab.	2.400.000
94	132050201035	1-2	Bangku Tunggu	2011	Frontline		Besi Metal						APBD Kab.	4.528.636
95	132050201035	1	Bangku Tunggu	2014	FRONTLINE / Kursi bandara jok		Besi&oscar						APBD Kab.	3.100.000
96	132050201035	1	Bangku Tunggu Isi 4	2019	Importa / G-405	212,6 x 55,5 x 69,5 cm	Stainless steel						APBD Kab.	2.300.000
97	132050201036	1	Kursi Lipat	2005	besi		Besi, Plastik						APBD Kab.	85.000
98	132050201036	2	Kursi Lipat	2005	Tanpa Merk		Besi, Plastik						APBD Kab.	85.000
99	132050201036	3-43	Kursi Lipat	2005	Tanpa Merk		Besi, Plastik						APBD Kab.	1.955.000
100	132050201036	4	Kursi Lipat	2005	tanpa merk		Besi, Plastik						APBD Kab.	85.000
101	132050201036	22-50	Kursi Lipat	2005	tanpa merk		Besi, Plastik						APBD Kab.	1.870.000
102	132050201036	26	Kursi Lipat	2005	tanpa merkj		Besi, Plastik						APBD Kab.	85.000
103	132050201036	27	Kursi Lipat	2005	tanpaa merk		Besi, Plastik						APBD Kab.	85.000
104	132050201036	1-35	Kursi Lipat	2007	tanpa merk		Besi						APBD Kab.	8.835.000
105	132050201036	6-18	Kursi Lipat	2007	tanpa merk		Besi						APBD Kab.	570.000
106	132050201036	17	Kursi Lipat	2007	Tanpa merk		Besi						APBD Kab.	285.000
107	132050201036	33	Kursi Lipat	2007	tanpa merk		Besi						APBD Kab.	285.000

No.	Nomor		Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Nomor					Asal usul / Cara Perolehan	Harga Rp
	Kode Barang	Register						Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108	132050201039	1	Meja Komputer	2018	Activ		Kayu						APBD Kab.	1.400.000
109	132050201039	2	Meja Komputer	2018	tanpa merk		Kayu						APBD Kab.	1.400.000
110	132050201039	1	Meja Komputer	2022	Tanpa Merek		Multiplek						APBD Kab.	1.942.500
111	132050201048	1	Sofa	2008	Tanpa merk		Kayu/ Busa						APBD Kab.	3.250.000
112	132050201050	1	Meubelair Lain - Lain	2006	Tanpa merek		Kayu						APBD Kab.	40.000
113	132050201050	2	Meubelair Lain - Lain	2006	tanpa merek		Kayu						APBD Kab.	40.000
114	132050201050	3	Meubelair Lain - Lain	2006	tanpa merek		Kayu						APBD Kab.	40.000
115	132050201050	4	Meubelair Lain - Lain	2006	tanpa Merek		Kayu						APBD Kab.	40.000
116	132050201050	5	Meubelair Lain - Lain	2006	Tanpa merek		Kayu						APBD Kab.	40.000
117	132050201050	1	Meja Rias	2015	Tanpa merk / Meja Rias MPB 49		Kayu/Kaca						APBD Kab.	2.075.000
118	132050203003	1	Mesin Potong Rumput	2020	Firman / FGB 438		Besi, Metal, Baja						APBD Kab.	4.500.000
119	132050204001	1	Lemari Es	2015	SHARP / SJ195MD-FP	2 pintu	Plastik/Besi	9321215 H00828					APBD Kab.	3.050.000
120	132050204001	1	Lemari Es	2020	Sharp / 197WDW		Besi, Metal						APBD Kab.	2.600.000
121	132050204003	1	AC Unit	2013	TANPA MERK		PLASTIK						APBD Kab.	2.950.000
122	132050204003	2	AC Unit	2013	Samsung	2 PK	Plastik						APBD Kab.	7.914.500
123	132050204003	1	AC Unit	2016	SHARP / AH-A18SEY	2 PK	Plastik, besi	6101274 3					APBD Kab.	6.913.000
124	132050204003	1-2	AC Unit	2018	Panasonic	1/2 PK	Logam						APBD Kab.	5.900.000
125	132050204003	1	AC Unit	2019	Sharp / AH-A9UCY	1 PK	Besi, Plastik						APBD Kab.	4.500.000
126	132050204004	1	AC Split	2011	Samsung / 12 TULN	2 PK	Besi						APBD Kab.	4.197.272
127	132050204004	2	AC Split	2011	Samsung / 09 UGPN	1 PK	Besi						APBD Kab.	3.258.409
128	132050204004	1	AC Split	2014	LG / SN12 LGS-2		Plastik & besi						APBD Kab.	5.000.000
129	132050204004	1	AC Split	2015	SHARP / AH-5SEY	1/2 PK	Plastik/Besi	5100132 8					APBD Kab.	3.700.000
130	132050204004	2	AC Split	2015	SHARP / AH-AP9SSY	1 PK	Plastik/Besi	5100595 0					APBD Kab.	3.950.000
131	132050204004	1	AC Split	2018	Sharp / Non Inverter	1 PK	Besi						APBD Kab.	3.950.000

No.	Nomor		Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Nomor					Asal usul / Cara Perolehan	Harga Rp
	Kode Barang	Register						Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	132050204004	1	A.C. Split	2021	Sharp / 18 UCY	2 PK	Plastik, Metal, Besi						APBD Kab.	9.000.000
133	132050204004	2-3	A.C. Split	2021	Sharp / 18 UCY	2 PK	Besi, Plastik						APBD Kab.	18.000.000
134	132050204006	1	Kipas Angin	2010	Maspion		Plastik						APBD Kab.	789.166
135	132050204006	1-2	Kipas Angin	2020	Krisbow / Misty Fan	16"	Besi, Plastik						APBD Kab.	3.000.000
136	132050205009	1	Tabung Gas	2015	tanpa merk	12 kg	Baja						APBD Kab.	850.000
137	132050205026	1	Alat Dapur Lainnya	2008	tanpa merk		kayu/stanlis						APBD Kab.	750.000
138	132050206002	1	Televisi	2013	SONY		plastik						APBD Kab.	3.495.000
139	132050206002	1	Televisi	2015	SHARP / LC-32LE2651	32 inchi	Plastik	9643315 KO4319					APBD Kab.	3.150.000
140	132050206002	1	Televisi	2019	Samsung LED / UA43RU7100	42 Inch	Besi, Kaca						APBD Kab.	7.950.000
141	132050206002	1	Televisi	2020	Samsung TV / 49J5250	49"	Besi, Metal, Plastik						APBD Kab.	7.200.000
142	132050206005	1	Amplifier	2005	TOA/Tens		Plastik						APBD Kab.	60.000
143	132050206007	1	Loudspeaker	2008	Tanpa Merk		Plastik						APBD Kab.	850.000
144	132050206008	1	Sound System	2014	tanpa merk								APBD Kab.	26.150.000
145	132050206008	1	Sound System	2023	CRIMSON		Plastik						APBD Kab.	4.500.000
146	132050206014	1	Microphone	2013	Tanpa Merk								APBD Kab.	845.000
147	132050206029	1	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2005	tanpa merk		Kayu, Kaca						APBD Kab.	50.000
148	132050206029	2	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2005	tanpa merk		Kayu, Kaca						APBD Kab.	50.000
149	132050206036	1	Tangga Alumunium	2016	PALM Star	3 m	Alumunium						APBD Kab.	1.500.000
150	132050206037	1	Kaca Bening	2015	tanpa merk		Kaca						APBD Kab.	600.000
151	132050206038	1	Dispencer	2020	Sharp / SWD 66 EHL		Besi, Metal						APBD Kab.	3.150.000
152	132050206039	1	Mimbar/Podium	2022	Tanpa Merk		Besi						APBD Kab.	3.600.000
153	132050206077	1	Tempat sampah 3 in 1	2015	tanpa merk / 3 in 1		Plastik						APBD Kab.	1.500.000
154	132050206077	2	Pompa air semi jet pump	2015	SHIMIZU / Semi Jet		Besi						APBD Kab.	645.000

No.	Nomor		Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Nomor					Asal usul / Cara Perolehan	Harga Rp
	Kode Barang	Register						Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
155	132050206077	3	Vas bunga besar	2015	tanpa merk		kaca						APBD Kab.	750.000
156	132050206077	4	Vas bunga besar	2015	tanpa merk		kaca						APBD Kab.	750.000
157	132050206077	5	Rak Piring Alumunium	2015	tanpa merk		Alumunium						APBD Kab.	1.950.000
158	132050206077	1	DVR CCTV	2018	tanpa merk	8 channel	Plastik						APBD Kab.	3.939.000
159	132050207001	1	Alat Pemadam Portable	2016	MAXIMAX / Serbuk	4,5 Kg	Baja	FA 65967					APBD Kab.	1.650.000
160	132050301006	1	Meja Kerja Pejabat Eselobn III	2012	TANPA MERK		Kayu						APBD Kab.	3.000.000
161	132050301009	1	Meja Kerja Lain-Lain	2008	tanpa merk		kayu						APBD Kab.	3.000.000
162	132050302011	1	Meja Tamu Biasa	2022	Tanpa Merek		Kayu Jati						APBD Kab.	2.775.000
163	132050303005	1	Kursi Kerja Pejabat Esewlon III	2013	TANPA MERK								APBD Kab.	1.900.000
164	132050303005	1	Kursi Kerja Pejabat Esewlon III	2014	tanpa merk		Besi & busa						APBD Kab.	3.600.000
165	132050303006	1	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2019	Tanpa Merk	150 x 75 x 75 cm	Kayu Jati, Kaca, Karpas						APBD Kab.	3.375.000
166	132050303006	1	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2020	1/2 Biro	150 x 75 x 75 cm	Kayu Jati						APBD Kab.	2.950.000
167	132050303006	2-3	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2020	Ergotech / LX 937 TR		Kulit, Besi, Plastik						APBD Kab.	6.600.000
168	132050304008	1	Kursi Lipat	2019	Tanpa merk		Besi, Stainless, Busa						APBD Kab.	540.000
169	132050304008	2-4	Kursi Lipat	2019	Tanpa Merk		Besi, Stainless, Busa						APBD Kab.	1.080.000
170	132050304008	3	Kursi Lipat	2019	Tanpa Merk		Besi, Stainless, Busa						APBD Kab.	540.000
171	132050304008	5-8	Kursi Lipat	2019	tanpa merk		Besi, Stainless, Busa						APBD Kab.	2.160.000
172	132050304008	9-41	Kursi Lipat	2019	Tanpa merk		Besi, Stainless, Busa						APBD Kab.	12.420.000
173	132050304008	13-22	Kursi Lipat	2019	tanpa merk		Besi, Stainless, Busa						APBD Kab.	4.860.000
174	132050304008	15	Kursi Lipat	2019	tanpa merk	baah	Besi, Stainless, Busa						APBD Kab.	540.000
175	132050304008	42	Kursi Lipat	2019	Tanpa merk		Besi, Stainless, Busa						APBD Kab.	540.000

No.	Nomor		Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Nomor					Asal usul / Cara Perolehan	Harga Rp
	Kode Barang	Register						Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
176	132050304008	43	Kursi Lipat	2019	tanpa merk		Besi, Stainless, Busa						APBD Kab.	540.000
177	132050304008	44	Kursi Lipat	2019	tanpa merk		Besi, Stainless, Busa						APBD Kab.	540.000
178	132050306005	1	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2020	tanpa merek / 32H		Kayu, Kain, Kaca						APBD Kab.	15.000.000
179	132050306013	1-3	Kursi Model Tanganan	2018	tanpa merek		Besi, Busa						APBD Kab.	3.600.000
180	132050306013	4	Kursi Model Tanganan	2018	Tanpa Merk		Besi, Busa						APBD Kab.	1.200.000
181	132050307010	1	Lemari Charger	2019	Tanpa Merk / 6 Kotak	50 cm x 60 cm	Kayu, Plastik						APBD Kab.	1.500.000
182	132060101036	1	Microphone/Wireless MIC	2023	IMDON / PRO-318		Akrilik						APBD Kab.	1.500.000
183	132060101096	1	Proyektor	2015	HITACHI / CP-X2530WN		Plastik	F5AE141 17					APBD Kab.	7.483.000
184	132060101096	1-3	Camera Dome CCTV	2019	EDGE	2 MP	Plastik						APBD Kab.	2.347.500
185	132060101096	4-6	Camera Outdoor CCTV	2019	EDGE	2 MP	Plastik						APBD Kab.	2.347.500
186	132060102003	1	Camera Electronic	2011	Canon / EOS D 1100		Mika						APBD Kab.	5.550.000
187	132060201003	1	Pesawat Telephone	1992	Panasonic/Faximile		Plastik						APBD Kab.	10.000
188	132060201006	1	Radio Panggil/Handy Talky (HT)	2008	tanpa merk		plastik						APBD Kab.	300.000
189	132070112045	1	Kursi Roda	2019	GEA / FS 868 L (Aluminium)		Aluminium						APBD Kab.	1.480.000
190	132090110015	1	Dispenser	2019	Miyako / Galon Bawah WDP 300	37,7 x 34,5 x 102 cm	Plastik, Stainless steel						APBD Kab.	900.000
191	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC)	2013	Acer		Plastik						APBD Kab.	6.000.000
192	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC)	2014	Acer		PLASTIK						APBD Kab.	5.925.000
193	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC)	2017	D4 Zumba / Desktop		Plastik						APBD Kab.	7.450.000

No.	Nomor		Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Nomor					Asal usul / Cara Perolehan	Harga Rp
	Kode Barang	Register						Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
194	132100102001	2	Personal Computer Unit (PC)	2017	D4 Zumba (Chasing) / Desktop		Plastik						APBD Kab.	7.450.000
195	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC)	2019	Alcatroz / Processor DualCore		Besi						APBD Kab.	7.100.000
196	132100102001	1	P.C Unit	2023	Asus / All In One		Akrilik						APBD Kab.	10.000.000
197	132100102002	1	Lap Top	2018	Asus / X441BA-GA9111	14 "	Plastik						APBD Kab.	6.900.000
198	132100102002	1	Lap Top	2020	Acer / Ryzen 5-3500	14"	Besi, Baja						APBD Kab.	9.800.000
199	132100102002	2	Lap Top	2020	Asus / A412FL Core i5-8265u	14"	Besi, Baja						APBD Kab.	12.000.000
200	132100102002	1	Lap Top	2021	Dell / Latitude 3410 : i3-1011	14"	Plastik						APBD Kab.	9.995.000
201	132100102003	1	Note Book	2008	tanpa merk		plastik						APBD Kab.	10.900.000
202	132100102003	1	Note Book	2012	Toshiba		plastik						APBD Kab.	8.284.100
203	132100102003	1	Note Book	2013	Toshiba		plastik						APBD Kab.	5.313.000
204	132100102003	1	Netbook	2015	Lenovo	10"	Besi,plastik						APBD Kab.	3.975.000
205	132100102003	1	Note Book	2017	ASUS / P2430U		Plastik	H9NXCVO2677436A					APBD Kab.	7.350.000
206	132100102003	2	Note Book	2017	ASUS / P2430U		Plastik/Besi	H9NXCVOIT376368					APBD Kab.	7.350.000
207	132100102003	1-2	Note Book	2018	Acer / Core i3		Mika						APBD Kab.	19.800.000
208	132100201003	1	Notebook	2011	Axio		Plastik						APBD Kab.	7.100.000
209	132100203001	1	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2022	LG	19 inc	Plastik						APBD Kab.	6.500.000
210	132100203002	1	Monitor	2018	LG / 22MK430H	22 "	Plastik						APBD Kab.	2.800.000
211	132100203002	1	Monitor Komputer	2019	LG / LED	22 Inch	Plastik						APBD Kab.	1.900.000
212	132100203002	1	Monitor	2022	LG	19 inc	Plastik						APBD Kab.	1.495.000
213	132100203003	1	Printer	2015	HP / Laserjet CP1025 color		Plastik/besi						APBD Prov.	3.000.000
214	132100203003	1	Printer	2017	Epson / L120		Plastik/ Besi	TP2K401531					APBD Kab.	1.700.000

No.	Nomor		Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Nomor					Asal usul / Cara Perolehan	Harga Rp
	Kode Barang	Register						Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
215	132100203003	2	Printer	2017	Epson / L120		Plastik/Besi	TP2K364 716					APBD Kab.	1.700.000
216	132100203003	3	Printer	2017	Epson / L120		Plastik/Besi	TR2K405 525					APBD Kab.	1.700.000
217	132100203003	4	Printer	2017	Canon / G2000		Plastik/Besi	KKRY34 989					APBD Kab.	2.650.000
218	132100203003	1	Printer	2019	Epson / L3110	A4	Plastik						APBD Kab.	2.950.000
219	132100203003	1	Printer	2020	Epson / L120		Plastik, Besi						APBD Kab.	2.000.000
220	132100203003	2	Printer	2020	Epson / L6170		Besi, Plastik						APBD Kab.	6.000.000
221	132100203003	3	Printer	2020	Epson / L120		Besi, Plastik						APBD Kab.	2.000.000
222	132100203003	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	Epson / L 4510		Plastik						APBD Kab.	4.000.000
223	132100203003	2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	Brother / T510W		Plastik						APBD Kab.	4.500.000
224	132100203003	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	Bradher		Plastik						APBD Kab.	6.000.000
225	132100204002	1	Router	2014	Mikrotik / RB2A1 V1AS2HND		Plastik						APBD Kab.	1.950.000
JUMLAH														1.350.063.415

Sumber: KIB B Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025

2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Kecamatan Purwokerto Timur diukur dari ketercapaian misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring misi yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Purwokerto Timur, strategi yang mendukung pencapaian tersebut adalah :

1. Melaksanakan Penyelenggaraan Pemeritnahan di Kecamatan sesuai SOP;
2. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayana Publik;
3. Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan;
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
5. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Optimalnya Kinerja Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja kecamatan Purwokerto Timur dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Purwokerto Timur adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang terampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan prima kepada warga masyarakat
- b. Penggunaan anggaran yang tepat sasaran
- c. Sarana dan prasarana yang mendukung

Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas berdasarkan Renstra sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Berdasar Renstra

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra						Realisasi				Capaian			
			2019	2020	2021	2022	2023	Akhir	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Index	82	83	84	85	86	86	82,02	89,5	84,75	87	100,02	107,83	100,89	102,35
	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	90	80	0	100	90	80	0
1.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan															
1.1	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	0
1.2	Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	85	85	85	85	85	85	80	80	80	0	80	80		0
1.3	Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%	95	95	75	95	95	95	15	85	25	0	15.79	89.47	33,33	0
1.4	Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%	85	85	95	85	85	85	80	85	90	0	80	85	94,74	0
1.5	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES/ADK	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	0
1.6	Persentase Linmas terbina	%	100	100	100	100	100	100	89	95	75	0	89	95		0
1.7	Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%	100	100	100	100	100	100	100	95	100	0	100	95	100	0
2.	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran															
2.1	Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100	100	100	100	25	90	65	0	25	90	65	0
2.2	Persentase realisasi keuangan program	%	100	100	100	100	100	100	25	80	36	0	25	80	36	0
3.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah															
3.1	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	90	70	0	100	90	70	0
3.2	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	95	80	0	100	95	80	0

Sumber: E-Monev Kec. Purwokerto Timur

Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Berdasar Perubahan Indikator (Renstra Perubahan)

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi			Capaian		
			2021	2022	2023	Akhir	2021	2022	2023	2021	2022	2023
I.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Index	84	85	86	86	84,75	87	88,05	100,89	102,35	102,38
	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PROGRAM 1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
1.1	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Persentase pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PROGRAM 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
2.1	Persentase Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PROGRAM 3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
3.1	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PROGRAM 4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
4.1	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.3	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.4	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: eMoney Kecamatan Purwokerto Timur

Indikator Kinerja Utama

Indikator Program

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Berdasar Perubahan Indikator

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra		Realisasi		Capaian	
			2024	2025	2024	2025 tw 1	2024	2025 tw 1
I	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	100	100,08	15	100,08	15
	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemerintah Kecamatan	%	100	100	100,35	30,05	100,35	30,05
	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	Nilai	83,9	83,92	83,75	NA	99,82	NA
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	89	89,25	89,25	101,42	100,28
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	50	100	50
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100	100	0	100	0
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	100	0	100	0
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	66,67	100	66,67

Sumber: eMonev Kecamatan Purwokerto Timur

Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Purwokerto Timur dari tahun 2021 hingga 2024 berdasarkan target renstra dan realisasi dan capaian secara umum menunjukkan pencapaian yang baik dengan rasio capaian 100%. Beberapa poin penting dari analisis:

- a. IKM Kecamatan terus meningkat dari 84,75 (2021) menjadi 89,25 (2024) dengan capaian 100% setiap tahun sejak tahun 2021.
- b. Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu dengan capaian 100% menunjukkan perbaikan dalam kualitas pelayanan publik.
- c. Indikator nilai SAKIP pemerintahan Kecamatan sebesar 82,20 (2023), 83,75 (2024), 82,20 (2025) dengan tingkat akuntabilitas kinerja A. Capaian nilai SAKIP tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,55 dari tahun 2024. Penurunan ini terjadi pada komponen pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal disebabkan karena kurang memadainya kualitas pelaporan dan evaluasi.

Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas menunjukkan pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel. Secara keseluruhan Kecamatan Purwokerto Timur telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dengan capaian menunjukkan tren positif dan stabil.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Kecamatan Purwokerto Timur adalah perangkat daerah, DPRD, instansi vertikal, lembaga, akademisi dan masyarakat.

2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

- a. Polsek Kecamatan Purwokerto Timur untuk menyediakan layanan keamanan, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- b. Koramil untuk membantu dalam aspek pertahanan dan keamanan serta kegiatan sosial masyarakat.
- c. Puskesmas untuk melaksanakan donor darah, cek kesehatan dan pengurusan BPJS kesehatan masyarakat tidak mampu.
- d. Kantor Urusan Agama untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah dll.
- e. Bappeda untuk memberikan pelayanan kepada kecamatan terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah, melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan Purwokerto Timur berjalan dengan baik dan terarah.
- f. Dindikcapil mitra kerja dalam hal layanan penerbitan akta kelahiran, kartu keluarga serta perekaman eKTP bagi pemula.
- g. Tim Penggerak PKK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pelaksanaan program PKK, Bimbingan teknis serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah kecamatan Purwokerto Timur.
- h. Bapenda mitra kerja pelayanan di Kecamatan untuk pemungutan, pelayanan dan sosialisasi pajak daerah serta masalah terkait PBB.
- i. Dinas Sosial mitra pelayanan di kecamatan untuk menangani ODGJ, orang terlantar serta focus pada kesejahteraan sosial , perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan merupakan pernyataan tentang kondisi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan merupakan kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena mempunyai dampak besar bagi entitas.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Purwoketo Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Berdasarkan evaluasi, ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Purwokerto Timur mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

Tabel 2.8
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Purwokerto Timur

Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1	Belum optimalnya hasil pembinaan pengawasan Kecamatan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	1	Kurangnya pendampingan Kecamatan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran
	2	Belum optimalnya peran kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan	2	Kurangnya fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
	3	Belum optimalnya peran kecamatan dalam keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	3	Belum optimalnnya penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
	4	Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi masyarakat	4	Belum optimalnya pelayanan sesuai SOP
			5	Belum optimalnya sarana dan prasarana pemerintah kecamatan
			6	Belum optimalnya pengelolaan SDM pelayanan kecamatan

Sumber: RPJMD Tahun 2025

Adapun identifikasi permasalahan tiap seksi;

- 1). Seksi Pelayanan
- Belum optimalnya sarana dan prasarana kecamatan dalam rangka melaksanakan dan memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.
- 2). Seksi Pemerintahan Kelurahan
- Masih rendahnya persentase pembayaran PBB
- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan
- Target pendapatan retribusi sewa tanah bengkok tidak tercapai karena kendala lahan tidak disewakan karena tidak

produktif/kering serta banyaknya penyewa yang tidak tepat waktu membayar sewa sesuai perjanjian.

- Masih rendahnya tingkat keaktifan dan kapasitas lembaga kemasyarakatan di kelurahan.
- Masih banyaknya usulan masyarakat di musrembang yang belum bisa terealisasi karena keterbatasan anggaran.

3). Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- Masih adanya penyaluran bantuan sosial yang belum tepat sasaran
- Belum optimalnya penyelenggaraan bimtek/pelatihan pemberdayaan masyarakat karena keterbatasan anggaran.

4). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- belum optimalnya penyelenggaraan Bimtek dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota satlinmas karena keterbatasan anggaran.

5). Sekretariat

- Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur menjalankan program kerja sesuai tugas dan fungsinya serta yang memahami IT.
- Sumber Daya Aparatur masih kurang dibanding dengan beban kerja yang menjadi kewenangan kecamatan.
- Sarana dan prasarana belum memadai terutama peralatan dan mesin kantor serta sarana prasarana gedung beserta pemeliharannya karena keterbatasan anggaran.
- Belum optimalnya penyusunan perencanaan dan pengelolaan anggaran.

2.2.2.Isu Strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Purwokerto Timur merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 yang

meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi serta ekspektasi pada masa datang, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Purwokerto Timur adalah **“Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”**.

Berikut disajikan tabel 2.9 yang memuat analisis Isu-Isu di Lingkungan Dinamis (Global, Nasional, dan Regional) yang dapat dikembangkan menjadi Isu Strategis Pemerintah Daerah Kecamatan Purwokerto Timur:

Tabel. 2.9
Isu Strategis Sesuai Lingkungan Dinamis Pemerintahan Daerah Kecamatan Purwokerto Timur

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1. Destinasi Pariwisata 2. Pengembangan Industri Peternakan 3. Pengembangan Industri Perkebunan dan Pertanian	Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Belum optimalnya reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, keamanan, dan kapasitas keuangan daerah	Berkurangnya kesenjangan; (Goal: Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara)	Isu pembangunan perkotaan: kontribusi ekonomi perkotaan terhadap nasional, urban sprawl, isu infrastruktur, lingkungan, ekonomi dan tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Kecamatan Sumbang Tahun 2025-2029 didasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Purwokerto Timur dapat secara tepat mengetahui yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas selama periode Renstra tahun 2025-2029 adalah **Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas.**

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas adalah: **Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Kecamatan.**

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya; Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan; Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh; Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan.

Teknik merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Purwokerto Timur dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.19.0000 - Kecamatan Purwokerto Timur											
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berintegritas, Adaptif, Kolaboratif dan Inovatif	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		Nilai Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (%)	-	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kinerja pemerintahan kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Angka)	3,71	3,72	3,73	3,74	3,75	3,76	3,77	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	83,750	83,920	83,950	84	84,100	84,200	84,300	
			Nilai SPIP Perangkat Daerah (Angka)	3,350	3,391	3,433	3,475	3,518	3,561	3,605	
			Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: E-Planing Kecamatan Purwokerto Timur 2025-2029

Ket: Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.2 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan						
						Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	Progres Positif	Rata-rata Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	N/A	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai SAKIP perangkat daerah	83,75	83,9	84	84	84,1	84,2	84,3
		Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,35	3,39	3,43	3,48	3,52	3,56	3,61
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,71	3,72	3,73	3,74	3,75	3,76	3,77
		Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja seluruh program non penunjang kecamatan	N/A	N/A	100	100	100	100	100

Sumber: E-Planing Kecamatan Purwokerto Timur 2025-2029

3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat daerah adalah:

- a. Optimalisasi Manajemen SDM Kecamatan dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta peran masyarakat dan desa dalam pembangunan.

3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra PD tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategis dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran renstra PD. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penahapan Renstra dan Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
Pengembangan Kapasitas SDM Pengelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Pengembangan Kompetensi Spesifik SDM Pengelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan penerapan pelayanan terstruktur dan transparan	Penguatan Manajemen Pelayanan dan Sistem Pengelolaan Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penguatan Sistem Manajerial Kecamatan	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	STRATEGI	PENAHAPAN STRATEGI RENSTRA PD				
			2026	2027	2028	2029	2030
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Optimalisasi Manajemen SDM Kecamatan dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan dan pengelolaan adminstrasi Kecamatan dan Desa	Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana dalam rangka optimalisasi Pelayanan di Kecamatan	Peningkatan tata kelola pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan Kecamatan	Penguatan tata kelola pelayanan dan penyelenggaraan kecamatan dalam rangka terwujudnya akuntabilitas pemerintahan kecamatan
		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta peran masyarakat dan desa dalam pembangunan	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan - Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat serta masyarakat dalam mencegah gangguan ketertiban dan bencana	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan - Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat serta masyarakat dalam mencegah gangguan ketertiban dan bencana	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan - Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat serta masyarakat dalam mencegah gangguan ketertiban dan bencana	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan - Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat serta masyarakat dalam mencegah gangguan ketertiban dan bencana	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan - Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat serta masyarakat dalam mencegah gangguan ketertiban dan bencana

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Berikut adalah uraian dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

4.1 Uraian Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program yang dimiliki Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Uraian Program, Sasaran Program, dan Indikator Program
Kecamatan Purwokerto Timur

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
(01)	(02)	(03)	(04)
1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
			Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
			Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)
			IKM Pelayanan Kecamatan

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
(01)	(02)	(03)	(04)
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah Nilai kematangan organisasi Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Tabel 4.2
Uraian Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Kecamatan Purwokerto Timur

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat
4	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
5	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan
6	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
			...

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
			Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
15	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA
			Persentase kesesuaian program renja dengan renstra

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan pagu Indikatif

Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja.

Renstra Tahun 2025-2029 Pada daftar Program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja perangkat daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 dikarenakan program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan Renja perangkat daerah tahun 2030.

Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								11.390.330.244		10.731.658.193		12.029.847.000		12.212.809.000		12.382.634.000		12.522.329.000		12.668.832.000
			Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	Progres Positif	Rata-rata Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	N/A		100		100		100		100		100		100	
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan								11.390.330.244		10.731.658.193		12.029.847.000		12.212.809.000		12.382.634.000		12.522.329.000		12.668.832.000
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai SAKIP perangkat daerah	83,75		83,92		83,95		84		84,1		84,2		84,3	
			Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,35		3,391		3,433		3,475		3,518		3,561		3,605	
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,71		3,72		3,73		3,74		3,75		3,76		3,77	
			Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja seluruh program non penunjang kecamatan	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
PURWOKERTO TIMUR																				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							30.250.000		3.362.500		26.350.000		26.877.000		27.414.000		27.962.000		28.521.000
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	Progres Positif	(Jumlah desa/kelurahan tanpa gangguan konflik sosial : jumlah total desa/kelurahan) x 100%	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							30.250.000		3.362.500		26.350.000		26.877.000		27.414.000		27.962.000		28.521.000
		Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	Kumulatif	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	N/A		N/A		4		4		4		4		4	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional							2.000.000		300.000		1.350.000		1.877.000		1.914.000		2.000.000		2.100.000
	...																			

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	Kumulatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25		20		25		50		50		50		50	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							28.250.000		3.062.500		25.000.000		25.000.000		25.500.000		25.962.000		26.421.000
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	Kumulatif	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana dalam 1 tahun	N/A		N/A		2		4		4		4		4	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Kumulatif	Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dalam satu tahun	6		6		4		4		4		4		4	
PURWOKERTO TIMUR																				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							34.000.000		15.707.125		66.200.000		71.715.000		82.893.000		87.994.000		95.000.000
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	Progres Positif	(Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan : jumlah kegiatan pemberdayaan yang direncanakan)*100%	100		100		100		100		100		100		100	
			Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	Progres Positif	Persentase keterwakilan unsur masyarakat dalam forum musrenbang di kecamatan	N/A		100		100		100		100		100		100	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							30.000.000		14.457.125		60.000.000		63.715.000		74.393.000		77.994.000		82.000.000
		Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	Progres Positif	Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilakukan / Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang direncanakan * 100%	100		100		100		100		100		100		100	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							25.000.000		11.592.125		47.350.000		50.715.000		61.143.000		62.994.000		66.000.000
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	Progres Positif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8		6		4		4		4		4		4	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							5.000.000		2.865.000		12.650.000		13.000.000		13.250.000		15.000.000		16.000.000

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	Progres Positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8		6		6		6		6		6		6	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							4.000.000		1.250.000		6.200.000		8.000.000		8.500.000		10.000.000		13.000.000
		Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	Progres Positif	(Jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan : jumlah total lembaga) x 100%	100		100		100		100		100		100		100	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										1.350.000		3.000.000		3.000.000		4.000.000		6.000.000	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	Angka	Kumulatif	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	N/A		2		1		2		2		2		2	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	N/A		N/A		2		2		2		2		2	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							4.000.000		1.250.000		4.850.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000		7.000.000
		Terlaksananya upaya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	Progres Positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8		6		6		6		6		6		6	
PURWOKERTO TIMUR																				
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							37.750.000		19.250.000		63.150.000		64.413.000		65.701.000		67.015.000		68.355.000
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	Progres Positif	(Jumlah koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum : jumlah koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang direncanakan)*100%	100		100		100		100		100		100		100	
			Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	%	Progres Positif	Gangguan trantibum yang tertangani dibagi gangguan trantibum yang terjadi	100		100		100		100		100		100		100	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										5.000.000		5.000.000		5.000.000		6.015.000		6.100.000	
		Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	Progres Positif	(Jumlah penegakan peraturan daerah yang dikoordinasikan : jumlah total penegakan) x 100%	100		100		100		100		100		100		100	
			..																	

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											5.000.000		5.000.000		5.000.000		6.015.000		6.100.000
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A		N/A		2		2		2		2		2	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							37.750.000		19.250.000		58.150.000		59.413.000		60.701.000		61.000.000		62.255.000
		Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	Kumulatif	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	N/A		N/A		4		6		6		6		6	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											1.650.000		2.500.000		3.451.000		3.500.000		4.000.000
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1		1		1		1		1		1		1	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							37.750.000		19.250.000		56.500.000		56.913.000		57.250.000		57.500.000		58.255.000
		Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6		8		6		6		6		6		6	
PURWOKERTO TIMUR																				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							15.000.000		6.107.875		40.200.000		41.004.000		41.824.000		42.660.000		43.513.000
	...																			

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselasaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	%	Progres Positif	Jumlah Permohonan Pelayanan Publik yang diselesaikan sesuai standar pelayanan dibagi jumlah permohonan pelayanan publik dikali 100	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
			IKM Pelayanan Kecamatan	Angka	Progres Positif	Nilai IKM	89,25		89		90		90,25		90,5		91		91,5	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum											1.350.000		1.504.000		1.924.000		2.000.000		2.250.000
		Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	Progres Positif	Jumlah koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum yang direncanakan * 100%	100		100		100		100		100		100		100	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum											1.350.000		1.504.000		1.924.000		2.000.000		2.250.000
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	Kumulatif	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	N/A		N/A		1		1		1		1		1	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							3.000.000		1.250.000		6.350.000		6.500.000		6.700.000		6.800.000		7.200.000
		Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	Progres Positif	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan / Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan yang direncanakan * 100%	100		100		100		100		100		100		100	
	Koordniasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							3.000.000		1.250.000		5.000.000		5.100.000		5.200.000		5.200.000		5.500.000
	..																			

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4		4		4		4		4		4		4	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											1.350.000		1.400.000		1.500.000		1.600.000		1.700.000
		Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	Kumulatif	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A		N/A		1		1		2		2		2	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							12.000.000		4.857.875		30.000.000		30.000.000		30.200.000		30.660.000		30.700.000
		Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	Progres Positif	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan / Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang direncanakan * 100%	100		100		100		100		100		100		100	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							7.000.000		2.500.000		15.000.000		15.000.000		15.200.000		15.460.000		15.500.000
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4		4		4		4		4		4		4	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							5.000.000		2.357.875		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.200.000		15.200.000
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4		4		4		4		4		4		4	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											2.500.000		3.000.000		3.000.000		3.200.000		3.363.000
		Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	Progres Positif	Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan / Jumlah kegiatan yang direncanakan	100		100		100		100		100		100		100	

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											2.500.000		3.000.000		3.000.000		3.200.000		3.363.000
		Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A		N/A		1		1		1		1		1	
PURWOKERTO TIMUR																				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6.928.196.663		7.552.809.452		8.107.604.931		8.129.975.622		8.154.425.400		8.174.625.620		8.194.975.620
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	Progres Positif	(Realisasi APBD Perangkat Daerah / Pagu APBD Perangkat Daerah) x 100%	93,95		95		95		95		95		95		95	
			Nilai kematangan organisasi	Angka	Progres Positif	Penilaian dilakukan berdasarkan self-assessment atau review eksternal terhadap aspek : Struktur organisasi dan kebijakan, Proses bisnis dan sistem kerja, Manajemen SDM dan kompetensi, Sistem pengendalian internal, Budaya organisasi dan nilai-nilai integritas	33		42		43		44		45		46		47	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	N/A		100		100		100		100		100		100	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	Progres Positif	(Nilai IP ASN Pegawai bernilai sedang - sangat tinggi / jumlah seluruh Pegawai ASN) x 100%	75,81		80		81		82		83		84		85	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6.575.839.667		7.105.622.515		7.392.622.555		7.392.622.555		7.392.722.555		7.392.822.555		7.392.922.555
		Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	Progres Positif	(npd, dokumen sppr, LS) dibandingkan dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu x 100%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							25.650.000		27.480.000		28.080.000		28.080.000		28.080.000		28.080.000		28.080.000
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kumulatif	Jumlah Dokumen Hasil PenyediaanAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		4		4		4		4		4		4	

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							6.550.189.667		7.078.142.515		7.361.142.555		7.361.142.555		7.361.142.555		7.361.142.555		7.361.142.555
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Progres Positif	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50		52		50		52		52		52		52	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											3.400.000		3.400.000		3.500.000		3.600.000		3.700.000
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Kumulatif	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	N/A		N/A		5		5		5		5		5	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							88.625.035		97.513.066		240.306.820		253.549.999		265.099.777		272.999.997		284.749.997
		Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
			Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	Progres Positif	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	23,8		24		25		26		27		28		29	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKP							5.000.000		3.975.000		8.000.000		12.000.000		13.499.777		16.000.000		20.000.000
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Kumulatif	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3		1		4		4		4		4		4	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							64.296.619		61.656.166		88.950.000		88.999.999		89.500.000		89.999.997		92.000.000
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							3.075.780		3.261.700		13.706.820		18.000.000		20.000.000		21.000.000		23.249.997
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12		10		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor							2.981.200		2.405.000		12.000.000		16.050.000		19.700.000		20.000.000		22.000.000
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3		3		5		5		5		5		5	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							8.492.400		14.182.000		33.000.000		33.500.000		35.000.000		35.500.000		36.000.000
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4		4		4		4		4		4		4	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							2.550.236		8.791.000		12.650.000		13.000.000		14.000.000		15.000.000		15.500.000
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3		3		3		4		4		4		4	

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							2.228.800		3.242.200		72.000.000		72.000.000		73.400.000		75.500.000		76.000.000
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12		2		2		2		2		2		2	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							18.895.000		24.800.000		68.850.000		74.500.000		80.500.000		88.600.000		93.500.000
		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Pemeliharaan Mebel											7.500.000		9.000.000		10.000.000		10.500.000		11.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Progres Positif	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2		N/A		3		4		4		4		4	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							9.960.000		3.650.000		9.550.000		10.000.000		12.000.000		16.100.000		17.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kumulatif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3		1		3		4		4		4		4	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											18.000.000		20.000.000		22.000.000		24.000.000		26.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Progres Positif	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		N/A		1		1		1		1		1	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											6.000.000		7.500.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Progres Positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A		N/A		1		1		1		1		1	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							8.935.000		21.150.000		27.800.000		28.000.000		28.500.000		29.000.000		29.500.000
	...																			
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kumulatif	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9		10		9		10		10		10		10	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									32.300.000		115.601.000		111.500.000		115.300.000		116.900.000		118.500.000
	...																			

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada legiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
			Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	Progres Positif	Jumlah unit realisasi pengadaan BMD / jumlah unit pada rencana kebutuhan BMD x 100%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
	Pengadaan Mebel											56.952.000		50.000.000		51.000.000		51.500.000		52.000.000
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3		N/A		4		4		4		4		4	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									32.300.000		54.149.000		54.200.000		54.300.000		54.400.000		54.500.000
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4		4		5		5		5		5		5	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											4.500.000		7.300.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1		N/A		1		1		1		1		1	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							234.021.961		289.171.596		270.224.556		275.803.068		276.803.068		278.303.068		279.303.068
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							40.716.825		72.006.488		70.921.488		72.500.000		73.000.000		74.000.000		74.500.000
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							188.305.136		210.165.108		193.303.068		193.303.068		193.303.068		193.303.068		193.303.068
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							5.000.000		7.000.000		6.000.000		10.000.000		10.500.000		11.000.000		11.500.000
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2		1		1		1		1		1		1	

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							10.815.000		3.402.275		20.000.000		22.000.000		24.000.000		25.000.000		26.000.000
		Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	Progres Positif	(Jumlah program pada dokumen Renja Perangkat Daerah yang terdapat dalam DPA / Jumlah program pada dokumen Renja Perangkat Daerah) X 100%	100		100		100		100		100		100		100	
			Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	%	Progres Positif	Jumlah Program yang ada di dokumen Renja : Jumlah Program yang ada di Renstra x 100%	100		100		100		100		100		100		100	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							6.005.000		1.050.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000		12.500.000		13.000.000
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1		1		8		8		8		8		8	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							4.810.000		2.352.275		10.000.000		11.000.000		12.000.000		12.500.000		13.000.000
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kumulatif	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3		3		4		4		4		4		4	
Sokanegara																				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							304.625.000		223.850.300		203.050.000		206.200.000		209.200.000		212.300.000		215.671.500
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	Progres Positif	(Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan : jumlah kegiatan pemberdayaan yang direncanakan)*100%	100		100		100		100		100		100		100	
			Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	Progres Positif	Persentase keterwakilan unsur masyarakat dalam forum musrenbang di kecamatan	100		100		100		100		100		100		100	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							304.625.000		223.850.300		203.050.000		206.200.000		209.200.000		212.300.000		215.671.500
		Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	Progres Positif	Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilakukan / Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang direncanakan * 100%	100		100		100		100		100		100		100	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							200.000.000		200.000.000		160.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000
		Terlaksananya pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	Progres Positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3		3		3		6		6		6		6	

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							101.500.000		20.800.300		40.000.000		12.000.000		15.000.000		18.000.000		20.000.000
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	Progres Positif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5		1		5		5		5		5		5	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							3.125.000		3.050.000		3.050.000		4.200.000		4.200.000		4.300.000		5.671.500
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	Progres Positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1		5		5		5		5		5		5	
Sokanegara																				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							408.191.468		288.228.828		419.334.318		440.279.063		459.696.100		474.712.065		490.739.730
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	Progres Positif	(Nilai IP ASN Pegawai bernilai sedang - sangat tinggi / jumlah seluruh Pegawai ASN) x 100%	75810		80		81		82		83		84		85	
			Nilai kematangan organisasi	Angka	Progres Positif	Penilaian dilakukan berdasarkan self-assessment atau review eksternal terhadap aspek : Struktur organisasi dan kebijakan, Proses bisnis dan sistem kerja, Manajemen SDM dan kompetensi, Sistem pengendalian internal, Budaya organisasi dan nilai-nilai integritas	33		42		43		44		45		46		47	
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Realisasi/pagu x 100%	93950		95		95		95		95		95		95	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	N/A		100		100		100		100		100		100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000
		Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	Progres Positif	(npd, dokumen sppr, LS) dibandingkan dengan SPJ yang dikumpulkan tepat waktu x 100%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		12		12		12		12		12		12	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							109.678.385		56.654.212		133.013.402		135.780.399		139.947.436		143.000.000		146.280.834
		Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor							4.596.800		3.790.800		4.214.100		4.500.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4		4		4		4		4		4		4	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							16.562.000		5.293.500		16.490.000		17.000.000		17.500.000		18.000.000		18.500.000
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4		4		4		4		4		4		4	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							9.973.270				5.252.000		5.500.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3		N/A		3		3		3		3		3	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							57.418.000		42.158.012		86.587.302		87.280.399		88.947.436		89.000.000		89.280.834
	...																			
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							14.866.315		5.410.000		13.000.000		13.500.000		14.000.000		14.500.000		15.000.000
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							6.262.000		1.900		7.470.000		8.000.000		8.500.000		9.000.000		9.500.000
	..																			

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12		N/A		2		2		2		2		2	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							31.560.000		15.688.000		31.976.000		47.500.000		58.000.000		63.460.232		70.210.232
		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegia Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Pemeliharaan Mebel											880.000		7.000.000		9.000.000		9.500.000		10.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Progres Positif	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A		N/A		2		2		2		2		2	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							13.560.000		2.880.000		12.100.000		12.500.000		12.750.000		13.000.000		13.250.000
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kumulatif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3		3		3		3		3		3		3	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							10.000.000		5.809.000		10.000.000		12.000.000		14.000.000		14.500.000		16.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Progres Positif	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		1		1		1		1		1		1	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											1.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Progres Positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A		N/A		1		1		1		1		1	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							8.000.000		6.999.000		7.996.000		9.000.000		14.250.000		17.460.232		20.960.232
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kumulatif	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6		6		9		9		9		9		9	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							51.945.500				37.506.300		38.500.000		42.500.000		48.253.169		53.500.000
		Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada legiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100		100		100		100		100		100		100	

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	Progres Positif	Jumlah unit realisasi pengadaan BMD / jumlah unit pada rencana kebutuhan BMD x 100%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
	Pengadaan Mebel										4.500.000		4.750.000		5.000.000		8.619.834		12.000.000	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A		N/A		1		1		1		1		1	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							51.945.500			24.456.300		25.000.000		25.500.000		26.000.000		26.500.000	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4		N/A		2		2		2		2		2	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										8.550.000		8.750.000		12.000.000		13.633.335		15.000.000	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A		N/A		3		3		3		3		3	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							192.507.583		193.386.616		194.338.616		195.998.664		196.748.664		197.498.664		198.248.664
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							27.098.255		21.887.952		23.339.952		24.000.000		24.250.000		24.500.000		24.750.000
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							161.409.328		165.998.664		165.998.664		165.998.664		165.998.664		165.998.664		165.998.664
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							4.000.000		5.500.000		5.000.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000		7.500.000
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2		1		1		1		1		1		1	
Arcawinangun																				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							305.250.000		221.467.500		204.000.000		206.200.000		209.200.000		212.300.000		215.671.500

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	Progres Positif	(Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan : jumlah kegiatan pemberdayaan yang direncanakan)*100%	100		100		100		100		100		100		100	
			Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	Progres Positif	Persentase keterwakilan unsur masyarakat dalam forum musrenbang di kecamatan	100		100		100		100		100		100		100	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							305.250.000		221.467.500		204.000.000		206.200.000		209.200.000		212.300.000		215.671.500
		Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	Progres Positif	Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilakukan / Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang direncanakan * 100%	100		100		100		100		100		100		100	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							200.000.000		200.000.000		160.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000
		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	Progres Positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5		4		3		6		6		6		6	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							101.500.000		17.617.500		40.000.000		12.000.000		15.000.000		18.000.000		20.000.000
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	Progres Positif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5		5		5		5		5		5		5	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							3.750.000		3.850.000		4.000.000		4.200.000		4.200.000		4.300.000		5.671.500
		Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	Progres Positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5		4		4		4		4		4		4	
Arcawinangun																				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							432.256.996		320.378.408		418.089.205		440.279.063		459.696.100		474.712.063		490.739.730
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	Progres Positif	(Realisasi APBD Perangkat Daerah / Pagu APBD Perangkat Daerah) x 100%	93950		95		95		95		95		95		95	
			Nilai kematangan organisasi	Angka	Progres Positif	Nilai Kematangan Organisasi	33		42		43		44		45		46		47	

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	Progres Positif	(Nilai IP ASN Pegawai bernilai sedang - sangat tinggi / jumlah seluruh Pegawai ASN) x 100%	75810		80		81		82		83		84		85	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	N/A		100		100		100		100		100		100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							22.500.000		21.900.000		21.900.000		21.900.000		21.900.000		21.900.000		21.900.000
		Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	Progres Positif	(npd, dokumen sppr, LS) dibandingkan dengan SPJ yang dikumpulkan tepat waktu x 100%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							22.500.000		21.900.000		21.900.000		21.900.000		21.900.000		21.900.000		21.900.000
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		4		4		4		4		4		4	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							121.683.200		61.209.400		100.570.579		106.713.955		114.630.992		118.646.955		130.924.622
	...	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor							1.936.200		400.000		615.000		2.000.000		1.500.000		2.000.000		2.500.000
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3		1		3		4		4		4		4	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							12.504.500		5.097.000		13.317.579		14.000.000		14.500.000		15.000.000		15.500.000
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4		4		4		4		4		4		4	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							3.000.000		1.352.000		2.442.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.500.000
	Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3		3		3		3		3		3		3	

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							88.240.000		45.105.000		65.998.000		66.713.955		73.630.992		75.646.955		85.424.622
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							9.750.000		9.253.500		10.728.000		11.000.000		11.500.000		12.000.000		12.500.000
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							6.252.500		1.900		7.470.000		8.000.000		8.500.000		9.000.000		9.500.000
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12		N/A		2		2		2		2		2	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							43.759.096		11.105.000		47.573.000		52.000.000		60.000.000		63.500.000		65.750.000
		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Pemeliharaan Mebel											7.500.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		10.500.000
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Progres Positif	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A		N/A		2		4		4		4		4	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							12.760.000		2.030.000		10.680.000		11.000.000		11.250.000		11.500.000		12.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kumulatif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4		3		3		3		3		3		3	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							20.001.096				13.878.000		14.000.000		16.000.000		17.000.000		17.500.000
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Progres Positif	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		N/A		1		1		1		1		1	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											1.540.000		5.000.000		8.000.000		9.000.000		9.500.000
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Progres Positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A		N/A		1		1		1		1		1	
		..																		

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							10.998.000		9.075.000		13.975.000		14.000.000		15.750.000		16.000.000		16.250.000
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kumulatif	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8		8		8		8		8		8		8	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							22.000.000				18.750.000		30.000.000		32.500.000		39.000.000		39.500.000
		Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
			Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	Progres Positif	Jumlah unit realisasi pengadaan BMD / jumlah unit pada rencana kebutuhan BMD x 100%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
	Pengadaan Mebel											1.500.000		5.000.000		7.000.000		10.000.000		10.000.000
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A		N/A		1		2		2		2		2	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							22.000.000				16.800.000		15.000.000		15.500.000		19.000.000		19.500.000
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2		N/A		3		6		6		6		6	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											450.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A		N/A		1		1		1		1		1	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							222.314.700		226.164.008		229.295.626		229.665.108		230.665.108		231.665.108		232.665.108
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							30.009.564		29.498.900		29.630.518		30.000.000		30.500.000		31.000.000		31.500.000
	...																			

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							188.305.136		193.665.108		193.665.108		193.665.108		193.665.108		193.665.108		193.665.108
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							4.000.000		3.000.000		6.000.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000		7.500.000
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2		1		1		1		1		1		1	
Kranji																				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							303.500.000		226.000.000		202.000.000		206.200.000		206.200.000		212.300.000		215.671.500
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	Progres Positif	(Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan : jumlah kegiatan pemberdayaan yang direncanakan)*100%	100		100		100		100		100		100		100	
			Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	Progres Positif	Persentase keterwakilan unsur masyarakat dalam forum musrenbang di kecamatan	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							303.500.000		226.000.000		202.000.000		206.200.000		206.200.000		212.300.000		215.671.500
		Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	Progres Positif	Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilakukan / Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang direncanakan * 100%	100		100		100		100		100		100		100	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							200.000.000		200.000.000		160.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000
		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	Progres Positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2		2		2		2		2		2		2	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							101.500.000		24.000.000		40.000.000		12.000.000		12.000.000		18.000.000		20.000.000
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	Progres Positif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5		1		5		5		5		5		5	

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							2.000.000		2.000.000		2.000.000		4.200.000		4.200.000		4.300.000		5.671.500
		Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	Progres Positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1		5		5		5		5		5		5	
Kranji																				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							434.006.996		315.544.708		420.189.205		440.279.063		459.696.100		474.712.063		490.739.730
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	Progres Positif	(Realisasi APBD Perangkat Daerah / Pagu APBD Perangkat Daerah) x 100%	93,95		95		95		95		95		95		95	
			Nilai kematangan organisasi	Angka	Progres Positif	Penilaian dilakukan berdasarkan self-assessment atau review eksternal terhadap aspek : Struktur organisasi dan kebijakan, Proses bisnis dan sistem kerja, Manajemen SDM dan kompetensi, Sistem pengendalian internal, Budaya organisasi dan nilai-nilai integritas	33		42		43		44		45		46		47	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	Progres Positif	(Nilai IP ASN Pegawai bernilai sedang - sangat tinggi / jumlah seluruh Pegawai ASN) x 100%	75,81		80		81		82		83		84		85	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	N/A		100		100		100		100		100		100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							23.400.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000
		Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	Progres Positif	(npd, dokumen sppr, LS) dibandingkan dengan SPJ yang dikumpulkan tepat waktu x 100%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							23.400.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		12		12		12		12		12		12	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							92.123.945		46.237.800		91.460.000		95.775.995		106.893.032		120.408.995		127.936.662
		Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor							1.310.000		681.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		6.000.000
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3		4		4		4		4		4		4	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							11.621.000		6.011.500		11.000.000		11.000.000		12.000.000		12.500.000		13.000.000
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4		4		4		4		4		4		4	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							11.907.000		886.000		4.990.000		5.000.000		5.500.000		5.750.000		8.000.000
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3		1		3		3		3		3		3	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							51.987.680		35.917.000		58.000.000		61.275.995		69.143.032		80.658.995		82.436.662
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							9.045.765		2.740.400		7.500.000		7.500.000		8.250.000		8.500.000		9.000.000
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							6.252.500		1.900		7.470.000		8.000.000		8.500.000		9.000.000		9.500.000
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12		N/A		2		2		2		2		2	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							64.900.000		10.080.000		44.940.000		52.200.000		53.500.000		56.000.000		59.250.000
	...																			

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Pemeliharaan Mebel											800.000		5.000.000		5.000.000		2.500.000		3.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Progres Positif	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A		N/A		2		2		2		2		2	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							9.320.000		4.060.000		8.120.000		8.200.000		8.250.000		11.500.000		12.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kumulatif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3		3		3		3		3		3		3	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							49.000.000				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		26.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Progres Positif	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		N/A		1		1		1		1		1	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											5.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Progres Positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A		N/A		1		1		1		1		1	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							6.580.000		6.020.000		6.020.000		7.000.000		7.250.000		8.000.000		8.250.000
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kumulatif	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9		6		6		6		6		6		6	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							28.619.500		6.000.000		30.274.337		40.000.000		46.000.000		44.500.000		48.750.000
		Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
			Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	%	Progres Positif	Jumlah unit realisasi pengadaan BMD / jumlah unit pada rencana kebutuhan BMD x 100%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
	Pengadaan Mebel							19.968.000				12.267.000		15.000.000		16.000.000		16.000.000		18.000.000

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3		N/A		1		1		1		1		1	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							8.651.500				6.000.000		10.000.000		15.000.000		16.000.000		18.000.000
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4		N/A		2		2		2		2		2	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									6.000.000		12.007.337		15.000.000		15.000.000		12.500.000		12.750.000
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A		3		3		3		3		3		3	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							224.963.551		230.726.908		231.014.868		229.803.068		230.803.068		231.303.068		232.303.068
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							32.624.000		31.061.800		31.211.800		30.000.000		30.500.000		31.000.000		31.500.000
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							188.339.551		193.665.108		193.303.068		193.303.068		193.303.068		193.303.068		193.303.068
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							4.000.000		6.000.000		6.500.000		6.500.000		7.000.000		7.000.000		7.500.000
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2		1		1		1		1		1		1	
Mersi																				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							303.500.000		228.430.000		202.000.000		206.200.000		209.200.000		212.300.000		215.671.500
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	Progres Positif	(Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan : jumlah kegiatan pemberdayaan yang direncanakan) *100% ...	100		100		100		100		100		100		100	

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	Progres Positif	Persentase keterwakilan unsur masyarakat dalam forum musrenbang di kecamatan	100		100		100		100		100		100		100	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							303.500.000		228.430.000		202.000.000		206.200.000		209.200.000		212.300.000		215.671.500
		Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	Progres Positif	Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilakukan / Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang direncanakan * 100%	100		100		100		100		100		100		100	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							200.000.000		200.000.000		160.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000
		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	Progres Positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4		4		3		6		6		6		6	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							101.500.000		26.730.000		40.000.000		12.000.000		15.000.000		18.000.000		20.000.000
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	Progres Positif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5		1		5		5		5		5		5	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							2.000.000		1.700.000		2.000.000		4.200.000		4.200.000		4.300.000		5.671.500
		Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakat an	Progres Positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5		5		5		5		5		5		5	
Mersi																				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							380.862.140		260.086.901		420.019.318		440.279.063		459.696.100		474.712.063		490.739.730
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	Progres Positif	(Realisasi APBD Perangkat Daerah / Pagu APBD Perangkat Daerah) x 100%	93950		95		95		95		95		95		95	
		...																		

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Nilai kematangan organisasi	Angka	Progres Positif	Penilaian dilakukan berdasarkan self-assessment atau review eksternal terhadap aspek : Struktur organisasi dan kebijakan, Proses bisnis dan sistem kerja, Manajemen SDM dan kompetensi, Sistem pengendalian internal, Budaya organisasi dan nilai-nilai integritas	33		42		43		44		45		46		47	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	Progres Positif	(Nilai IP ASN Pegawai bernilai sedang - sangat tinggi / jumlah seluruh Pegawai ASN) x 100%	75810		80		81		82		83		84		85	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	N/A		100		100		100		100		100		100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							21.900.000		21.900.000		21.900.000		21.900.000		21.900.000		21.900.000		21.900.000
		Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	Progres Positif	(npd, dokumen sppr, LS) dibandingkan dengan SPJ yang dikumpulkan tepat waktu x 100%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							21.900.000		21.900.000		21.900.000		21.900.000		21.900.000		21.900.000		21.900.000
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		12		12		12		12		12		12	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							114.431.944		60.919.625		130.042.422		143.920.167		148.587.204		158.103.167		167.630.834
		Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor							4.134.000		1.284.000		3.871.500		4.000.000		4.500.000		5.000.000		5.500.000
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3		4		4		4		4		4		4	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							26.333.500		11.030.000		24.917.000		34.850.000		35.000.000		37.600.000		41.850.000

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4		4		4		4		4		4		4	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							7.326.500		1.916.000		5.564.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3		3		3		3		3		3		3	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							55.765.000		41.260.000		78.230.000		79.070.167		80.487.204		84.869.834		86.780.834
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							10.147.744		5.429.625		9.989.922		12.000.000		13.100.000		13.633.333		15.000.000
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							10.725.200				7.470.000		8.000.000		8.500.000		9.000.000		9.500.000
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12		N/A		2		2		2		2		2	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							57.196.000		25.716.000		64.010.000		67.000.000		69.250.000		72.500.000		75.750.000
		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Pemeliharaan Mebel							800.000				800.000		2.000.000		3.000.000		4.000.000		5.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Progres Positif	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2		N/A		2		2		2		2		2	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							8.580.000		3.870.000		5.900.000		6.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Progres Positif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4		4		4		4		4		4		4	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							40.950.000		15.000.000		45.000.000		45.500.000		46.000.000		46.500.000		47.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Progres Positif	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		1		1		1		1		1		1	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000
	..																			

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Progres Positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A		N/A		1		1		1		1		1	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							6.866.000		6.846.000		7.310.000		8.000.000		8.250.000		8.500.000		8.750.000
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kumulatif	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	6		6		6		6		6		6		6	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							43.847.500				53.000.000		55.500.000		66.500.000		68.000.000		70.500.000
		Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
			Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	%	Progres Positif	Jumlah unit realisasi pengadaan BMD / jumlah unit pada rencana kebutuhan BMD x 100%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
	Pengadaan Mebel							10.500.000				18.500.000		19.000.000		21.000.000		21.500.000		23.000.000
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2		N/A		1		1		1		1		1	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							27.054.000				30.000.000		30.500.000		31.000.000		31.500.000		32.000.000
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2		N/A		2		2		2		2		2	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							6.293.500				4.500.000		6.000.000		14.500.000		15.000.000		15.500.000
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1		N/A		3		3		3		3		3	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							143.486.696		151.551.276		151.066.896		151.958.896		153.458.896		154.208.896		154.958.896
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100		100		100		100		100		100		100	

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							30.718.200		36.385.500		35.108.000		35.500.000		36.500.000		36.750.000		37.000.000
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							108.768.496		110.665.776		110.458.896		110.458.896		110.458.896		110.458.896		110.458.896
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							4.000.000		4.500.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000		7.500.000
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2		1		1		1		1		1		1	
Purwokerto Wetan																				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							305.250.000		238.750.000		204.000.000		206.200.000		209.200.000		212.300.000		215.671.500
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	Progres Positif	(Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan : jumlah kegiatan pemberdayaan yang direncanakan)*100%	100		100		100		100		100		100		100	
			Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di keca	%	Progres Positif	Persentase keterwakilan unsur masyarakat dalam forum musrenbang di kecamatan	100		100		100		100		100		100		100	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							305.250.000		238.750.000		204.000.000		206.200.000		209.200.000		212.300.000		215.671.500
		Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	Progres Positif	Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilakukan / Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang direncanakan * 100%	100		100		100		100		100		100		100	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							200.000.000		200.000.000		160.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000
		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	Progres Positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4		6		4		6		6		6		6	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							101.500.000		35.000.000		40.000.000		12.000.000		15.000.000		18.000.000		20.000.000
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	Progres Positif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5		5		5		5		5		5		5	

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							3.750.000		3.750.000		4.000.000		4.200.000		4.200.000		4.300.000		5.671.500
		Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	Progres Positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5		5		5		5		5		5		5	
Purwokerto Wetan																				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							405.684.568		271.865.676		418.494.318		440.229.063		459.696.100		474.712.063		490.739.730
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai kematangan organisasi	Angka	Progres Positif	Penilaian dilakukan berdasarkan self-assessment atau review eksternal terhadap aspek : Struktur organisasi dan kebijakan, Proses bisnis dan sistem kerja, Manajemen SDM dan kompetensi, Sistem pengendalian internal, Budaya organisasi dan nilai-nilai integritas	33		42		43		44		45		46		47	
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Realisasi/pagu x 100%	93,95		95		95		95		95		95		95	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	Progres Positif	(Nilai IP ASN Pegawai bernilai sedang - sangat tinggi / jumlah seluruh Pegawai ASN) x 100%	75,81		80		81		82		83		84		85	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	N/A		100		100		100		100		100		100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							21.690.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000
		Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	Progres Positif	(npd, dokumen sppr, LS) dibandingkan dengan SPJ yang dikumpulkan tepat waktu x 100%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							21.690.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		12		12		12		12		12		12	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							109.927.200		82.573.700		126.221.000		143.320.167		147.437.204		153.453.167		163.530.834
		Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor							3.046.000		1.848.000		8.261.000		11.000.000		15.000.000		15.000.000		16.000.000
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4		4		4		4		4		4		4	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							17.269.500		15.144.500		13.529.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4		4		4		4		4		4		4	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							8.000.000		2.531.000		10.005.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		18.530.834
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3		3		3		3		3		3		3	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							60.170.000		49.591.000		72.596.000		75.320.167		74.937.204		80.453.167		85.000.000
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							15.189.200		13.459.200		14.360.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.500.000
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							6.252.500				7.470.000		8.000.000		8.500.000		9.000.000		9.500.000
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12		N/A		2		2		2		2		2	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							65.990.000		23.928.000		65.723.000		66.550.000		75.750.000		77.500.000		80.500.000
	...																			

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Pemeliharaan Mebel									4.034.000		6.359.000		6.500.000		10.000.000		10.000.000		11.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Progres Positif	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A		N/A		2		2		2		2		2	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							11.640.000		7.620.000		10.880.000		11.000.000		11.250.000		11.500.000		12.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kumulatif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3		3		4		4		4		4		4	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							44.100.000				28.200.000		28.500.000		28.750.000		29.000.000		29.250.000
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Progres Positif	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		N/A		1		1		1		1		1	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											5.000.000		5.250.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Progres Positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A		N/A		1		1		1		1		1	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							10.250.000		12.274.000		15.284.000		15.300.000		15.750.000		16.000.000		16.250.000
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kumulatif	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7		7		7		7		7		7		7	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							67.800.000				56.850.000		60.400.000		63.050.000		63.800.000		65.250.000
		Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
			Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	%	Progres Positif	Jumlah unit realisasi pengadaan BMD / jumlah unit pada rencana kebutuhan BMD x 100%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A		N/A		1	24.450.000	1	25.000.000	1	25.250.000	1	25.500.000	1	25.750.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							61.800.000				12.400.000		13.500.000		15.500.000		16.000.000		16.500.000
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2		N/A		2		2		2		2		2	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							6.000.000				20.000.000		21.900.000		22.300.000		22.300.000		23.000.000
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3		N/A		3		3		3		3		3	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							140.277.368		142.863.976		147.200.318		147.458.896		150.958.896		157.458.896		158.958.896
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							27.500.656		28.698.200		30.741.422		31.000.000		34.000.000		40.000.000		41.000.000
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							108.776.712		110.665.776		110.458.896		110.458.896		110.458.896		110.458.896		110.458.896
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							4.000.000		3.500.000		6.000.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000		7.500.000
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2		1		1		1		1		1		1	
Purwokerto Lor																				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							303.450.000		240.356.112		202.000.000		206.200.000		209.200.000		212.300.000		215.671.500
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	Progres Positif	(Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan : jumlah kegiatan pemberdayaan yang direncanakan)*100%	100		100		100		100		100		100		100	

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamt	%	Progres Positif	Persentase keterwakilan unsur masyarakat dalam forum musrenbang di kecamatan	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							303.450.000		240.356.112		202.000.000		206.200.000		209.200.000		212.300.000		215.671.500
		Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	Progres Positif	Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilakukan / Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang direncanakan * 100%	100		100		100		100		100		100		100	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							200.000.000		200.000.000		170.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000		190.000.000
		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	Progres Positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1		1		1		1		1		1		1	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							101.500.000		38.356.112		30.000.000		12.000.000		15.000.000		18.000.000		20.000.000
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	Progres Positif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8		1		5		5		5		5		5	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							1.950.000		2.000.000		2.000.000		4.200.000		4.200.000		4.300.000		5.671.500
		Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	Progres Positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12		5		5		5		5		5		5	
Purwokerto Lor																				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							458.556.413		299.462.808		413.165.705		440.279.063		459.696.100		474.712.063		490.739.730
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai kematangan organisasi	Angka	Progres Positif	Nilai Kematangan Organisasi	33		42		43		44		45		46		47	
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Realisasi/pagu x 100%	93950		95		95		95		95		95		95	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	Progres Positif	(Nilai IP ASN Pegawai bernilai sedang - sangat tinggi / jumlah seluruh Pegawai ASN) x 100%	75810		80		81		82		83		84		85	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	N/A		100		100		100		100		100		100	

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000
		Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	Progres Positif	(npd, dokumen sppr, LS) dibandingkan dengan SPJ yang dikumpulkan tepat waktu x 100%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000		22.500.000
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		12		12		12		12		12		12	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							95.561.356		50.494.950		95.076.637		109.213.955		113.880.992		123.146.955		130.448.702
		Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Umum Perangkat Daer	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor							4.782.500		2.668.000		3.000.000		3.750.000		4.000.000		6.000.000		7.000.000
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3		4		4		4		4		4		4	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							20.414.000		10.004.950		12.999.800		14.250.000		14.500.000		14.750.000		14.030.833
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4		4		4		4		4		4		4	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							2.504.000		5.000.000		5.263.000		5.500.000		5.750.000		6.000.000		6.250.000
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3		3		3		3		3		3		3	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							50.300.000		27.422.000		58.337.000		68.000.000		69.987.204		72.753.167		77.000.000
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							11.640.856		5.400.000		8.006.837		9.713.955		11.143.788		14.643.788		16.667.869
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							5.920.000				7.470.000		8.000.000		8.500.000		9.000.000		9.500.000

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12		N/A		2		2		2		2		2	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							101.457.000		7.020.000		30.786.000		44.500.000		48.000.000		51.500.000		55.000.000
		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Pemeliharaan Mebel										960.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		11.000.000	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Progres Positif	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A		N/A		2		2		2		2		2	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							6.520.000		2.440.000		12.930.000		13.000.000		13.250.000		13.500.000		13.750.000
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kumulatif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3		1		3		3		3		3		3	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							89.964.000				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Progres Positif	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		N/A		1		1		1		1		1	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										2.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Progres Positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A		N/A		1		1		1		1		1	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							4.973.000		4.580.000		4.896.000		5.500.000		5.750.000		6.000.000		6.250.000
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kumulatif	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6		6		6		6		6		6		6	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							22.737.000				47.500.000		44.000.000		54.250.000		55.500.000		59.000.000
		Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100		100		100		100		100		100		100	

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miiik daerah (RKBMD)	%	Progres Positif	Jumlah unit realisasi pengadaan BMD / jumlah unit pada rencana kebutuhan BMD x 100%	N/A		N/A		100		100		100		100		100	
	Pengadaan Mebel											14.500.000		15.000.000		15.250.000		15.500.000		18.000.000
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A		N/A		1		1		1		1		1	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							22.737.000				30.000.000		24.000.000		24.500.000		25.000.000		25.500.000
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4		N/A		2		2		2		2		2	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											3.000.000		5.000.000		14.500.000		15.000.000		15.500.000
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A		N/A		3		3		3		3		3	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							216.301.057		219.447.858		217.303.068		220.065.108		221.065.108		222.065.108		223.791.028
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							23.995.921		21.782.750		20.000.000		21.762.040		22.512.040		23.262.040		24.737.960
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							188.305.136		193.665.108		193.303.068		193.303.068		193.303.068		193.303.068		193.303.068
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							4.000.000		4.000.000		4.000.000		5.000.000		5.250.000		5.500.000		5.750.000
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2		2		1		1		1		1		1	

Sumber: Eplaning Kecamatan Purwokerto Timur 2025-2029

4.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Daerah menetapkan sejumlah subkegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.

Sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah pada Kecamatan Purwokerto Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Daftar Sub kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	PG, PB
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	PB
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

Sumber: Sipd-Ri.kemendagri.go.id/renstra

4.4.1 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah

Indikator kinerja Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwokerto Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Purwokerto Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Meningkatnya Kinerja layanan Pemerintah Kecamatan	Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	-	100	100	100	100	100	100	100
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,71	3,72	3,73	3,74	3,75	3,76	3,77	3,77
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	83,750	83,920	83,950	84,00	84,100	84,200	84,300	84,300
			Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,350	3,391	3,433	3,475	3,518	3,561	3,605	3,605
			Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	-	-	100	100	100	100	100	100

Sumber: Eplaning Kecamatan Purwokerto Timur 2025-2029

4.4.2 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak memiliki IKK.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)

BAB V

PENUTUP

Renstra Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Kecamatan Purwokerto Timur menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra Kecamatan Purwokerto Timur dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2029. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Kecamatan Purwokerto Timur agar melaksanakan program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan dan mendukung pencapaian target Renstra;
2. Kecamatan Purwokerto Timur agar menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purwokerto Timur yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Purwokerto Timur sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Purwokerto, 22 September 2025

Camat Purwokerto Timur
Kabupaten Banyumas

OKA YUDHISTIRA PRANAYUDHA, S.STP., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19811212 200012 1 003